



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



TAHUN 2025

**SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BANTEN
TAHUN 2026**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2025 Sasaran Strategis Sekretariat Daerah perpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dimana Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2025, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Diimplementasikan dengan indikator Hubungan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi/Sister Province (Instansi) diamanatkan kepada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Dimanfaatkan (%) diamanatkan kepada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan indikator Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai) diamanatkan kepada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
4. Meningkatnya Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi dengan indikator Indeks Reformasi Hukum (Indeks) diamanatkan kepada Biro Hukum;
5. Meningkatnya Kepatuhan Implementasi Standar Pelayanan Publik yang berkelanjutan dengan indikator Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik (Nilai) diamanatkan kepada Biro Organisasi;
6. Meningkatnya Pelaporan Kinerja yang Informatif dengan indikator Nilai Komponen Pelaporan Kinerja (Nilai) diamanatkan kepada Biro Organisasi;
7. Meningkatnya Budaya Kerja ASN dengan indikator Indeks ASN Berakhlak (Nilai) diamanatkan kepada Biro Organisasi;
8. Meningkatnya Pelayanan Sekretariat Daerah dengan indikator Indeks Pelayanan Sekretariat Daerah (Indeks) diamanatkan kepada Biro Umum;
9. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan dengan indikator Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Dimanfaatkan (%) diamanatkan kepada Biro

Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;

10. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator Persentase Kebijakan Ekonomi yang Dimanfaatkan (%), diamanatkan kepada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
11. Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Nilai), diamanatkan kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
12. Meningkatnya Pelayanan Pimpinan dengan indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan (Indeks) diamanatkan kepada Biro Administrasi Pimpinan.

Laporan ini memuat capaian kinerja Sekretariat Daerah dengan menampilkan target dan capaian indikator kinerja pada setiap sasaran strategis sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Diimplementasikan dengan indikator Hubungan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi/Sister Province (Instansi) yang diamanatkan kepada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah tahun 2025 ditargetkan terjalin 7 kerjasama, dengan realisasi 10 kerjasama atau capaian 142,86%;
2. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Dimanfaatkan (%), yang diamanatkan kepada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah ditargetkan mendapat nilai 100%, dengan realisasi 100% capaian 100%;
3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan indikator Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai) yang diamanatkan kepada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, dengan target kinerja tahun 2025 mendapat nilai 3,49, sehubungan nilai tahun 2025 belum rilis, untuk nilai realisasi menggunakan nilai tahun 2024 yaitu sebesar 3,45 atau capaian 98,85%;
4. Meningkatnya Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi dengan indikator Indeks Reformasi Hukum (Indeks) yang diamanatkan kepada Biro Hukum ditargetkan mendapat nilai 99,41, adapun

realisasi sebesar 99.64 dengan Kategori AA (Istimewa) atau capaian 100,23%, capaian tersebut sudah melebihi target akhir jangka menengah;

5. Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Implementasi Standar Pelayanan Publik yang berkelanjutan dengan indikator Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik (Nilai) ditargetkan mendapat nilai 94,02, dengan realisasi tahun 2025 sebesar 89,53 capaian 95,22%;
6. Meningkatnya Pelaporan Kinerja yang Informatif dengan indikator Nilai Komponen Pelaporan Kinerja (Nilai) Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, nilai kinerja ini merupakan nilai kinerja tahun 2025 ditargetkan mendapat nilai 11,17, nilai capaian tahun 2025 yaitu sebesar 10,76 atau 96,33%;
7. Meningkatnya Budaya Kerja ASN dengan indikator Indeks ASN Berakhlak (Nilai) yang diamanatkan kepada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi ditargetkan mendapat nilai 76, tahun 2025 kementerian RB tidak melakukan penilaian indeks ASN BerAKHLAK sehingga capaian kinerja mengacu pada hasil realisasi tahun 2024 yaitu 75.8 atau 99,73%;
8. Meningkatnya Pelayanan Sekretariat Daerah dengan indikator Indeks Pelayanan Sekretariat Daerah (Indeks) yang diamanatkan kepada Biro Umum, ditargetkan mendapat nilai 3,20, dengan realisasi 3,45 capaian 107,81%;
9. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan dengan indikator Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Dimanfaatkan (%) yang diamanatkan kepada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, ditargetkan mendapat nilai 100%, dengan realisasi 100% capaian 100%;
10. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator Persentase Kebijakan Ekonomi yang Dimanfaatkan (%) yang diamanatkan kepada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan ditargetkan mendapat nilai 100%, dengan realisasi 100% capaian 100%;
11. Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Nilai) penanggung jawab Biro Pengadaan Barang/Jasa ditargetkan

mendapat nilai 89,30 dengan realisasi 93,63 capaian 104,85%;

12. Meningkatnya Pelayanan Pimpinan dengan indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan (Indeks) penanggung jawab Biro Administrasi Pimpinan, ditargetkan mendapat nilai 3,20, dengan realisasi 3,46 capaian 108,13%.

Untuk menunjang program dan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 didukung pendanaan sebagai berikut :

Pagu Anggaran Rp. 245.137.431.880,- (*Dua Ratus Empat Puluh Lima Milyar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah*)

Realisasi Anggaran Rp. 225.565.789.216,- (*Dua Ratus Dua Puluh Lima Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah*) atau **92,02%, Sisa anggaran Rp. 19.571.642.664,-** (*Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*) atau **7,98%.**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT., berkat rahmat dan hidayah Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 dapat disajikan, yang mana merupakan sarana bagi Sekretariat Daerah Provinsi Banten selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja tahun 2025 kepada seluruh stakeholder/pemangku kepentingan dan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten dalam memperbaiki kinerja dimasa depan.

Laporan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagaimana diketahui Intruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999, mengamanatkan akuntabilitas kinerja sebagai perwujudan dan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang ditetapkan dan rencana strategis. *Pengejawantahan* pertanggungjawaban dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2025 merupakan implementasi pengukuran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2025-2029, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk melakukan koreksi atas kelemahan yang ada, dan mempertajam prioritas pembangunan ditahun yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik dan diharapkan laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh aparatur dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap agar informasi yang disajikan dalam evaluasi kinerja diakhir tahun anggaran 2025 dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi atas kinerja pembangunan serta koreksi atas kelemahan yang ada dan dapat mempertajam prioritas rencana pembangunan untuk terwujudnya peningkatan kualitas kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 20 Februari 2026
Sekretaris Daerah

Deden Apriandhi

DAFTAR ISI

IKTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Dasar Hukum	2
1.4 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.5 Isu-isu Strategis Sekretariat Daerah	18
1.6 Sistematisasi Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
2.1 Rencana Strategis Tahun 2025-2029	21
2.1.1 Visi Pemerintah Provinsi Banten	21
2.1.2 Misi Pemerintah Provinsi Banten	21
2.1.3 Tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Banten	22
2.1.4 Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Banten	22
2.2 Rencana Kerja Tahun 2025	24
2.3 Perjanjian Kinerja 2025	71
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	73
3.1 Capaian Kinerja	73
3.1.1 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024	73
3.1.2 Capaian Kinerja di Bandingkan Dengan Tahun Sebelumnya	77
3.1.3 Capaian Kinerja dibandingkan Dengan Target Akhir Renstra	81
3.1.4 Capaian kinerja dibandingkan dengan target Nasional	84
3.1.5 Analisis faktor penyebab keberhasilan/kegagalan capaian kinerja	87

3.1.6 Analisis atas efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja	99
3.1.7 Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung capaian kinerja	106
3.2 Realisasi Anggaran	117
BAB IV PENUTUP	119
4.1 Kesimpulan	119
4.2 Saran	121
Lampiran-lampiran	
1) Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah (Murni dan Perubahan)	
2) Surat Pernyataan Telah di Reviu	
3) Dokumen lainnya yang diperlukan	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rincian Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah 27

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Murni Sekretariat Daerah Tahun
2025 67

Tabel 2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah tahun
2025 68

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah	7
Gambar 3.1 Realisasi Anggaran	115

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Penyelenggaraan Otonomi Daerah mengalami perubahan-perubahan yang mendasar, Penyelenggaraan Otonomi sebagaimana dibuat dalam undang-undang tersebut akan jauh demokratis dan memiliki kewenangan yang luas dengan pemberian sumber daya nasional dan pembagian keuangan yang proporsional dan adil, hal ini tentu saja akan mengakibatkan adanya kinerja pemerintah yang didasarkan pada akuntabilitas, responsivitas dan aksesibilitas dalam memberikan pelayanan barang dan jasa pemerintah selain dari adanya desain kualitas prima bagi Produk Pemerintah Daerah menurut Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Akuntabilitas merupakan azas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), yang dapat didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan Pengelolaan Sumber daya dan Pelaksanaan Kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, Akuntabilitas dapat diuraikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari tindakan seseorang atau lembaga kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau lembaga yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu, Akuntabilitas juga merupakan Instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan evaluasi kinerja program, kegiatan dan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Banten akhir tahun 2025 ini disusun sebagai bagian Integral dari siklus Akuntabilitas Kinerja pelaksanaan

kegiatan satuan kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Laporan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten adalah wujud implementasi pengendalian manajemen yang berkenaan dengan penyelenggaraan urusan Desentralisasi, Dekonsentrasi dan program tugas pembantuan, Sistem pengendalian ini sebagai mekanisme untuk mengukur sejauh mana pencapaian kinerja perencanaan tahunan terhadap Visi, Misi, Strategi dan sasaran program kegiatan yang tertuang dalam perubahan rencana strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2025-2029.

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten;
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2025 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

1.4 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2025 Pasal 6 s.d Pasal 15 disebutkan bahwa bentuk susunan organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 2. Biro Kesejahteraan Rakyat;
 3. Biro Hukum.
- c. Asisten Pembangunan, Perekonomian dan Pengadaan membawahkan:
 1. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
 2. Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
 1. Biro Administrasi Pimpinan;
 2. Biro Umum;
 3. Biro Organisasi.

Susunan Organisasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah terdiri atas :

- a. kepala kiro;
- b. kepala bagian pemerintahan dan kerjasama;
- c. kepala subbagian tata usaha;
- d. kepala bagian otonomi daerah; dan
- e. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Susunan organisasi biro kesejahteraan rakyat terdiri atas:

- a. kepala biro;
- b. kepala bagian pembinaan mental spritual;
- c. kepala subbagian tata usaha;
- d. kepala bagian kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan non pelayanan dasar; dan

- e. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana

Susunan Organisasi Biro Hukum, terdiri atas :

- a. kepala biro;
- b. kepala bagian peraturan perundang-undangan kabupaten/kota;
- c. kepala subbagian tata usaha;
- d. kepala bagian peraturan perundang-undangan provinsi;
- e. kepala bagian bantuan hukum; dan
- f. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana..

Susunan organisasi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, terdiri atas:

- a. kepala biro;
- b. kepala bagian administrasi pembangunan;
- c. kepala subbagian tata usaha;
- d. kepala bagian perekonomian dan sumber daya alam; dan
- e. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Susunan organisasi Pengadaan dan Jasa, terdiri atas:

- a. kepala biro;
- b. kepala bagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- c. kepala subbagian tata usaha;
- d. kepala subbagian advokasi, kelembagaan dan sdm pengadaan barang dan jasa;
- e. kepala bagian pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
- f. kepala subbagian pelaksanaan, strategis dan monitoring pengadaan barang dan jasa;
- g. kepala bagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- h. kepala subbagian pengelolaan, pengembangan sistem dan data informasi; dan
- i. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Susunan organisasi Biro Administrasi Pimpinan, terdiri atas :

- a. a. kepala biro;
- b. kepala bagian perencanaan dan kepegawaian sekretariat daerah;
- c. kepala subbagian tata usaha;
- d. kepala bagian materi dan komunikasi pimpinan;
- e. kepala subbagian penyiapan materi
- f. kepala subbagian komunikasi pimpinan;
- g. kepala subbagian dokumentasi pimpinan;
- h. kepala bagian protokol;
- i. kepala subbagian acara
- j. kepala subbagian tamu;
- k. kepala subbagian hubungan keprotokolan; dan
- l. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Susunan Organisasi Biro Umum, terdiri atas :

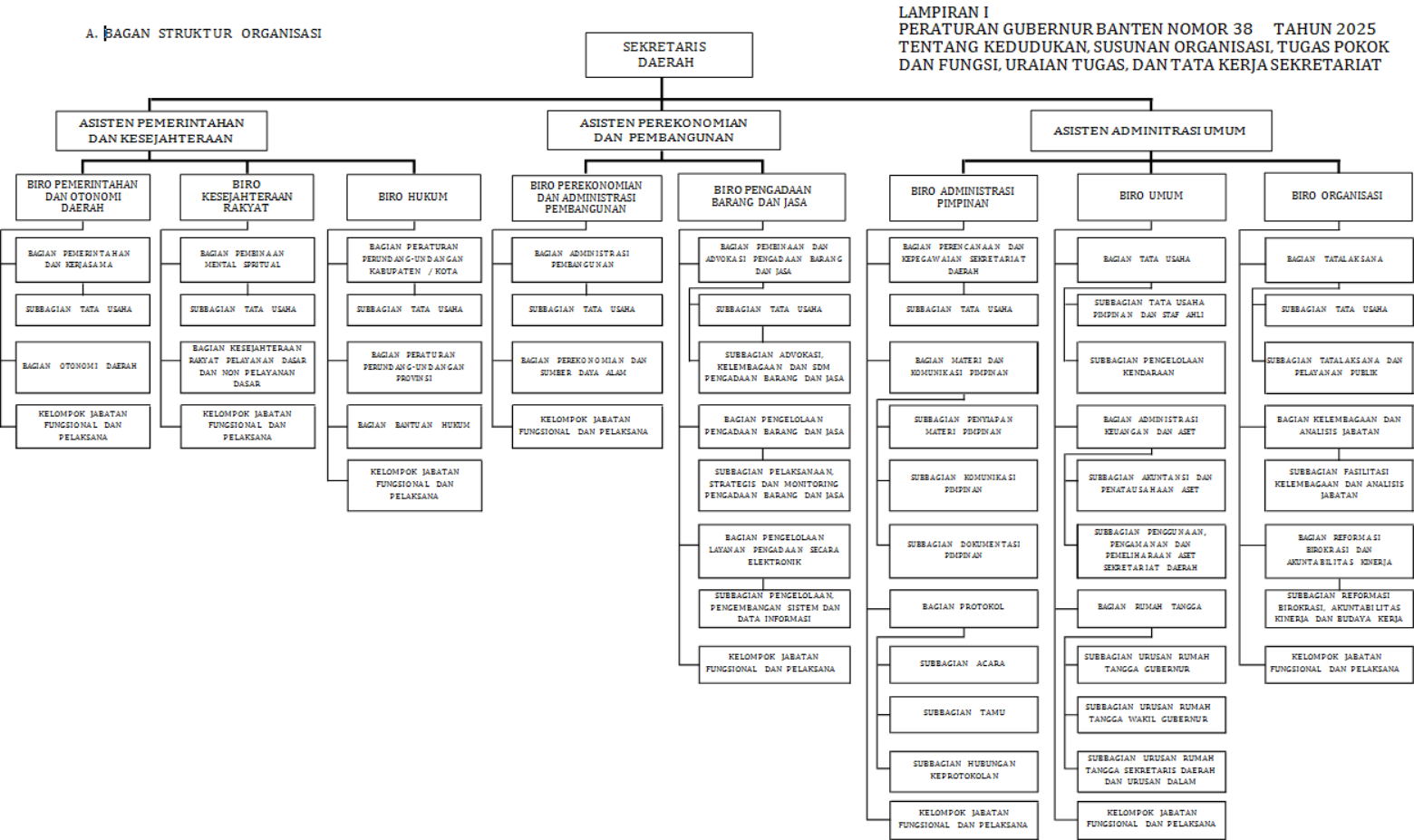
- a. kepala biro;
- b. kepala bagian tata usaha;
- c. kepala subbagian tata usaha pimpinan dan staf ahli;
- d. kepala subbagian pengelolaan kendaraan;
- e. kepala bagian administrasi keuangan dan aset;
- f. kepala subbagian akuntansi dan penatausahaan aset;
- g. kepala subbagian penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan aset Sekretariat Daerah;
- h. kepala bagian rumah tangga;
- i. kepala subbagian urusan rumah tangga gubernur
- j. kepala subbagian urusan rumah tangga wakil gubernur;
- k. kepala subbagian urusan rumah tangga sekretaris daerah dan urusan dalam; dan

- l. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Susunan Organisasi Biro Organisasi, terdiri atas :

- a. a. kepala biro;
- b. kepala bagian tatalaksana;
- c. kepala subbagian tata usaha;
- d. kepala subbagian tatalaksana dan pelayanan publik;
- e. kepala bagian kelembagaan dan analisis jabatan;
- f. kepala subbagian fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan;
- g. kepala bagian reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
- h. kepala subbagian reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja; dan
- i. f. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah



Sumber data : Pergub No. 38 Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten No. 38 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 16 berbunyi : Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas Staf Ahli;
- f. pelaksanaan tugas sekretariat perangkat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
- g. pelaksanaan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam Pasal 17 sampai dengan pasal 27 berbunyi tentang tugas pokok dan fungsi Asisten Daerah dan Biro berbunyi :

- (1) Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, melaksanakan tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, serta pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang berada di bawah koordinasinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan hukum;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat dan urusan

pemerintahan;

- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum.
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan hukum;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Koordinasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- 1. biro pemerintahan dan otonomi daerah;
 - 2. biro kesejahteraan rakyat;
 - 3. biro hukum;
 - 4. sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah;
 - 5. inspektorat daerah;
 - 6. badan kesatuan bangsa dan politik.
 - 7. dinas pendidikan dan kebudayaan;
 - 8. dinas kesehatan;
 - 9. satuan polisi pamong praja;
 - 10. dinas sosial;
 - 11. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - 12. dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana;
 - 13. dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;

14. dinas kepemudaan dan olahraga; dan
 15. dinas tenaga kerja dan transmigrasi.
- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, melaksanakan tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, serta pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian, pengadaan barang dan jasa serta administrasi pembangunan.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian, pengadaan barang dan jasa, administrasi pembangunan;
 - c. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 1. biro perekonomian dan administrasi pembangunan;

2. biro pengadaan barang dan jasa;
 3. badan perencanaan pembangunan daerah;
 4. badan penanggulangan bencana daerah.
 5. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
 6. dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 7. dinas lingkungan hidup dan kehutanan;
 8. dinas perhubungan;
 9. dinas kelautan dan perikanan;
 10. dinas pariwisata;
 11. dinas pertanian;
 12. dinas ketahanan pangan;
 13. dinas energi dan sumber daya mineral; dan
 14. dinas perindustrian dan perdagangan.
- (1) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c, melaksanakan tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, serta pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang organisasi, umum, dan administrasi pimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), asisten administrasi umum mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang umum dan administrasi pimpinan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
 - e. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum dan administrasi pimpinan;
 - f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi

dan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
g. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

1. biro administrasi pimpinan;
2. biro umum;
3. biro organisasi;
4. badan pendapatan daerah;
5. badan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
6. badan kepegawaian daerah;
7. badan pengembangan sumber daya manusia daerah;
8. badan penghubung;
9. dinas perpustakaan dan kearsipan;
10. dinas komunikasi informatika, statistik dan persandian; dan
11. dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah.

(1) Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama;

- c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (1) Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
 - b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
 - c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (1) Kepala Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di

bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang- undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi hukum;
 - b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang peraturan perundang undangan provinsi, peraturan perundang- undangan kabupaten/kota, serta dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang- undangan kabupaten/kota, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (1) Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan administrasi pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di

- bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan;
 - c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
 - b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan

secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Kepala Biro Administrasi Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Administrasi Pimpinan mempunyai fungsi:

a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, materi dan komunikasi pimpinan, serta protokol;

b. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawiaan Sekretariat Daerah, materi dan komunikasi pimpinan, serta protokol;

c. pelaksanaan fungsi lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Kepala Biro Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, dan tata usaha.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Umum mempunyai fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha;
 - b. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, dan tata usaha; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (1) Biro Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Organisasi mempunyai fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
 - b. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
 - c. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
 - d. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

1.5 Isu-isu Strategis Sekretariat Daerah

Permasalahan yang menjadi isu strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2025 saat ini antara lain :

1. Belum optimalnya pengimplementasian SAKIP daerah.
2. Belum optimalnya penyederhanaan produk hukum daerah.
3. Kerjasama daerah pemerintah Provinsi Banten belum maksimal dilakukan hanya sebatas Kerjasama dalam negeri saja.
4. Belum optimalnya pengelolaan BLUD.
5. Belum optimalnya implementasi standar pelayanan public.
6. Belum optimal Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik dan bebas KKN.
7. Belum optimalnya hasil rumusan kebijakan yang dikeluarkan Biro untuk mendukung kebijakan Provinsi.

Aspek strategis merupakan penjabaran lebih detail dari Tujuan Sekretaris Daerah dengan 12 indikator dan target yang terukur. Dengan demikian aspek tersebut dijabarkan melalui Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kepatuhan Implementasi Standar Pelayanan Publik yang berkelanjutan dengan 1 indikator sasaran.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Pelayanan Pimpinan dengan 1 indikator sasaran

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Pelayanan Sekretariat Daerah yang Prima dengan 1 indikator sasaran

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi dengan 1 indikator sasaran

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan dengan 1 indikator sasaran

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan dengan 1 indikator sasa

- Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Diimplementasikan dengan 1 indikator
- Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan 1 indikator sasaran
- Sasaran Strategis 9 : Meningkatnya Pelaporan Kinerja yang Informatif dengan 1 indikator sasaran
- Sasaran Strategis 10 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan 1 indikator sasaran
- Sasaran Strategis 11 : Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan 1 indikator sasaran
- Sasaran Strategis 12 : Meningkatnya Budaya Kerja ASN dengan 1 indikator sasaran

1.6 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten mengacu pada beberapa dasar hukum sebagai berikut:

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2025 mengacu pada Peraturan Kementrian PAN RB RI Nomor : 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan tentang latar belakang penyusunan dokumen, struktur organisasi, tugas dan fungsi organisasi Sekretariat Daerah, isu strategis yang dihadapi, peta proses bisnis, tindaklanjut rekomendasi AKIP tahun 2024 dan sistematika penulisan dokumen LKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjabarkan terkait perencanaan kinerja, rencana strategis, rencana kerja tahun 2025 yang akan dilakukan (Sasaran strategis, program, kegiatan dan subkegiatan dan anggaran yang dibutuhkan guna menunjang tercapainya sasaran kinerja di tahun 2025 serta perjanjian kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 dengan Standar Nasional
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

b. Realisasi Anggaran

Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi Sekretariat Daerah serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 2) Surat Pernyataan Telah Di Reviu
- 3) Dokumen lainnya yang diperlukan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2025-2029

Sebagai sebuah Instansi Sektor Publik, Pemerintah Provinsi Banten mempunyai Rencana Strategis dan Perubahannya yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2025-2029 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul/rencana strategis Pemerintah Provinsi Banten yang mencakup Visi/Misi Prioritas Daerah, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan di bab ini.

2.1.1 Visi Pemerintah Provinsi Banten

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten 2025-2029, berpijak pada kondisi saat ini dan tantangan yang diproyeksikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten 2025-2045, serta mempertimbangkan potensi yang dimiliki dan harapan luhur masyarakat Provinsi Banten, yaitu visi Pembangunan Provinsi Banten 2025-2029.

Visi yaitu menggambarkan arah pembangunan dan kondisi masa depan, dalam Visi Provinsi Banten yang akan dicapai selama lima tahun mendatang sesuai dengan visi pembangunan Banten tahun 2025-2029, yaitu:

"BANTEN MAJU, ADIL MERATA TIDAK KORUPSI"

2.1.2 Misi Pemerintah Provinsi Banten

Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha mewujudkan visi, misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu untuk mewujudkan visi Provinsi Banten 2025-2029 tersebut akan ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Misi Pertama : Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan tangguh;

2. Misi Kedua : Mendorong kemajuan ekonomi secara inklusif melalui penguatan sektor kreatif, unggulan, dan potensial;
3. Misi Ketiga : Mewujudkan sumber daya manusia yang berintegritas, berdaya saing, berkualitas, inovatif, dan tidak diskriminatif;
4. Misi Keempat : Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas;
5. Misi Kelima : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara holistik dan resiliensi terhadap bencana.

2.1.3 Tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam periode 1-5 tahun mendatang, agar diketahui apa yang harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan berdasarkan rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 adalah :

1. Terwujudnya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif dengan indikator 'Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Kualitas Kebijakan';
2. Terbangunnya kapabilitas kelembagaan berkinerja tinggi yang berbasis jejaring dan lincah organisasi dengan indikator 'Nilai SAKIP';
3. Terbangunnya perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif dengan indikator 'Indeks Integritas Nasional'.

2.1.4 Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah diterapkan atau merupakan tujuan antara/dengan demikian tujuan akan tercapai apabila sasaran dapat terpenuhi dan berhasil, sasaran harus bersifat lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan memiliki jangka waktu pelaksanaan. Oleh karena itu

dalam menetapkan sasaran memerlukan indikator kinerja yang secara terperinci tujuan dan sasarnya.

Sasaran yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Banten berdasarkan Rencana Strategis serta Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kepatuhan Implementasi Standar Pelayanan Publik yang berkelanjutan dengan indikator Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik (Nilai) Biro Organisasi;
2. Meningkatnya Pelayanan Pimpinan dengan indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan (Indeks) penanggung jawab Biro Administrasi Pimpinan;
3. Meningkatnya Pelayanan Sekretariat Daerah yang Prima dengan indikator Indeks Pelayanan Sekretariat Daerah (Indeks) penanggung jawab Biro Umum;
4. Meningkatnya Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi dengan indikator Indeks Reformasi Hukum (Indeks) penanggung jawab Biro Hukum;
5. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan dengan indikator Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Dimanfaatkan (%) penanggung jawab Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
6. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator Persentase Kebijakan Ekonomi yang Dimanfaatkan (%) penanggung jawab Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
7. Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Diimplementasikan dengan indikator Hubungan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi/Sister Province (Instansi) penanggung jawab Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
8. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Dimanfaatkan (%) penanggung jawab Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
9. Meningkatnya Pelaporan Kinerja yang Informatif dengan indikator Nilai Komponen Pelaporan Kinerja (Nilai) penanggung

- jawab Biro Organisasi;
10. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan indikator Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai) penanggung jawab Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 11. Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Nilai) penanggung jawab Biro Pengadaan Barang dan;
 12. Meningkatnya Budaya Kerja ASN dengan indikator Indeks ASN Berakhlak (Nilai) penanggung jawab Biro Organisasi.

2.2 Rencana Kerja Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan masa transisi kepemimpinan di Provinsi Banten oleh sebab itu Sekretariat Daerah yang merupakan salah satu Perangkat Daerah perlu melakukan peninjauan dan penyesuaian rencana kerja untuk memastikan keselarasan dengan Visi dan Misi baru. Perubahan ini bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dan dampak program kerja, serta menindaklanjuti arahan dari pemerintahan baru.

Perubahan ini lebih difokuskan pada sasaran strategis serta indikator kinerja sasaran Sekretariat Daerah, dalam perubahan rencana kerja tahun 2025 sasaran dan indikator kinerja berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 yang telah diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029, sedangkan untuk program dan kegiatan tidak mengalami perubahan, meskipun terdapat perubahan dalam sasaran dan indikator kinerja Sekretariat Daerah berkomitmen mempertahankan capaian positif sebelumnya sambil mengimplementasikan inovasi dan strategi baru.

Lebih jelas disampaikan sasaran dan indikator kinerja sasaran dari rencana kerja murni dan perubahan, sebagai berikut :

- Rencana kerja murni tahun 2025 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah, memiliki lima sasaran strategis dan enam indikator kinerja sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya Pelayanan Sosial	Proporsi Penduduk Miskin yang mendapatkan Pelayanan Sosial
2	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
3	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita Tahunan yang disesuaikan
4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Persepsi Anti Korupsi
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)

- Rencana kerja perubahan tahun 2025 sesuai dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah, memiliki dua belas sasaran strategis dan dua belas indikator kinerja sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Diimplementasikan	Hubungan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi/Sister Province
2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Dimanfaatkan
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4	Meningkatnya Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi	Indeks Reformasi Hukum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
5	Meningkatnya Kepatuhan Implementasi Standar Pelayanan Publik yang berkelanjutan	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik
6	Meningkatnya Pelaporan Kinerja yang Informatif	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja
7	Meningkatnya Budaya Kerja ASN	Indeks ASN Berakhlak
8	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat Daerah yang Prima	Indeks Pelayanan Sekretariat Daerah
9	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Dimanfaatkan
10	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Ekonomi yang Dimanfaatkan
11	Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
12	Meningkatnya Pelayanan Pimpinan	Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan

Kemudian dari faktor anggaran juga mengalami perubahan pagu yang semula sebesar **Rp. 253.786.078.000,-** (*Dua Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah*) menjadi **Rp. 245.137.431.880,-** (*Dua Ratus Empat Puluh Lima Milyar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah*), hal tersebut terjadi dengan adanya kebijakan pusat tentang efisiensi anggaran. Rincian rencana kerja dan perubahan anggaran tahun 2025 disampaikan seperti pada table 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Rincian Program, Kegiatan dan Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGE T	PAGU ANGGARAN (Rp)		PENANGUNG JAWAB
										MURNI	PERUBAHAN	
Meningkatnya Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi	Indeks Reformasi Hukum							Indeks	99,41	2,473,870,800	1,853,760,800	BIRO HUKUM
		Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi Produk Hukum yang terlayani					Persen	100	2,473,870,800	1,853,760,800	
				Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase Penyusunan Perundang-Undangan Yang Terfasilitasi			Persen	100	1,347,564,800	1,040,854,800	
					Nilai Survai Kepuasan Masyarakat JDIH							
					Persentase Produk Hukum Kabupaten/Kota yang terfasilitasi dan terevaluasi			Persen	100			
						Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Dokumen	20	464,782,000	451,085,000	
						Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Dokumen	24	164,934,400	146,224,400	
						Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	Dokumen	4	428,244,400	206,915,400	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGE T	PAGU ANGGARAN (Rp)		PENANGUNG JAWAB
										MURNI	PERUBAHAN	
						Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Dokumen	32	289,604,000	236,630,000	
				Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Layanan Perkara yang tertangani					1,126,306,000	812,906,000	
						Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	Kasus	12	575,000,000	418,300,000	
					Persentase Bantuan Hukum Masyarakat Miskin dan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang terlayani	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	Kasus	22	551,306,000	394,606,000	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah					Indeks		573,525,200	486,057,000	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah			Nilai		28,175,000	23,819,000	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	13,100,000	10,284,000	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	2,500,000	2,080,000	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGE T	PAGU ANGGARAN (Rp)		PENANGUNG JAWAB
										MURNI	PERUBAHAN	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	2,500,000	2,080,000	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	2,500,000	2,260,000	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	2,500,000	2,260,000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	2,500,000	2,500,000	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	2,575,000	2,355,000	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai SAP (Standar					4,000,000	3,480,000	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGE T	PAGU ANGGARAN (Rp)		PENANGUNG JAWAB
										MURNI	PERUBAHAN	
					akuntansi pemerintahan)	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1,500,000	1,140,000	
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1,150,000	1,110,000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	3	1,350,000	1,230,000	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN perangkat daerah yang memiliki predikat SKP minimal BAIK					30,750,000	15,600,000	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	30,750,000	15,600,000	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan layanan administrasi umum yang dilaksanakan sesuai standar dan jadwal					284,000,000	230,567,800	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket	1	99,500,000	107,650,000	
						Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	Paket	1	79,000,000	54,123,000	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGE T	PAGU ANGGARAN (Rp)		PENANGUNG JAWAB
										MURNI	PERUBAHAN	
						Penggandaan	Penggandaan Yang Disediakan					
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	105,500,000	68,794,800	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pelayanan Penunjang Sesuai Jadwal					226,600,200	212,590,200	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1,300,000	1,140,000	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	225,300,200	211,450,200	
							JUMLAH PAGU ANGGARAN			3,047,396,000	2,339,817,800	
Meningkatnya Pelaporan Kinerja yang informastif	Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Provinsi	Program Penataan Organisasi	Persentase cakupan kegiatan kelembagaan					Persen	100	849,000,000	448,307,500	BIRO ORGANISASI
				Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan			Persen	100	849,000,000	448,307,500	
						Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	Dokumen	1	279,000,000	148,077,800	
						Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	230,000,000	114,696,800	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGE T	PAGU ANGGARAN (Rp)		PENANGUNG JAWAB
										MURNI	PERUBAHAN	
						Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Doumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabtan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Dokumen	1	340,000,000	185,532,900	
			Persentase cakupan kegiatan akuntabilitas							410,000,000	181,199,600	
				Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					410,000,000	181,199,600	
						Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	1	410,000,000	181,199,600	
Meningkatnya Kepatuhan implementasi standar Pelayanan Publik yang berkelanjutan	Nilai kepatuhan pelayanan publik		Persentase cakupan kegiatan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik							729,945,000	606,250,000	
				Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					729,945,000	606,250,000	
						Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Dokumen	1	309,945,000	184,970,000	
						Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peingkatan Pelayanan Publik	Dokumen	1	420,000,000	421,280,000	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGE T	PAGU ANGGARAN (Rp)		PENANGUNG JAWAB
										MURNI	PERUBAHAN	
Meningkatnya Budaya Kerja ASN	Indeks ASN Berakhlak		Persentase cakupan kegiatan reformasi dan budaya kerja							533,000,000	246,879,340	
				Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					533,000,000	246,879,340	
						Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen	1	333,000,000	124,630,900	
						Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Laporan	1	200,000,000	122,248,440	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah							527,776,000	418,989,324	
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					36,000,000	36,000,000	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	2,400,000	2,400,000	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	Dokumen	1	2,100,000	2,100,000	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp)		PENANGUNG JAWAB
										MURNI	PERUBAHAN	
							SKPD					
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	1	2,100,000	2,100,000	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	2,100,000	2,100,000	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	2,100,000	2,100,000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Dokumen	1	2,400,000	2,400,000	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	22,800,000	22,800,000	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGE T	PAGU ANGGARAN (Rp)		PENANGUNG JAWAB
										MURNI	PERUBAHAN	
				Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah					16,486,400	16,486,400	
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	3,302,400	3,302,400	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	3,276,800	3,276,800	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3,302,400	3,302,400	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	1	3,302,400	3,302,400	
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	3,302,400	3,302,400	
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah					40,638,000	24,986,000	
						Peningkatan Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Peningkatan Sarana	Unit	1	6,000,000	6,000,000	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGE T	PAGU ANGGARAN (Rp)		PENANGUNG JAWAB
										MURNI	PERUBAHAN	
						Disiplin Pegawai	dan Prasarana Disiplin Pegawai					
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	34,638,000	18,986,000	
				Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah					106,862,160	88,829,984	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	58,847,800	42,666,000	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	12,200,000	12,200,000	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	6,934,360	7,423,984	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	16,480,000	14,140,000	
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	6,200,000	6,200,000	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dokumen	1	6,200,000	6,200,000	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					327,789,440	252,686,940	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGE T	PAGU ANGGARAN (Rp)		PENANGUNG JAWAB
										MURNI	PERUBAHAN	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	327,789,440	252,686,940	
							JUMLAH PAGU ANGGARAN			3,049,721,000	1,901,625,764	
Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Nilai)							Nilai	89.3	2,120,760,960	1,348,891,100	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
		Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ					Nilai	40	2,120,760,960	1,348,891,100	
			Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ					Nilai	26.13			
			Pemanfaatan Sistem Pengadaan					Nilai	23.17			
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Presentase pengadaan barang/jasa yang dikelola			Persen	90	428,990,000	335,565,400	
						Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	3	186,990,000	138,395,000	
						Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	1	120,000,000	79,395,000	
						Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	3	122,000,000	117,775,400	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGE T	PAGU ANGGARAN (Rp)		PENANGUNG JAWAB
										MURNI	PERUBAHAN	
				Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Presentase Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang dikelola			Persen	90	1,082,631,960	616,646,700	
						Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Laporan	2	894,081,200	539,905,700	
						Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	1	111,424,000	41,411,000	
						Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	1	77,126,760	35,330,000	
				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembinaan SDM, Kapasitas Kelembagaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa yang difasilitasi			Persen	90	609,139,000	396,679,000	
						Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	200	67,734,000	35,754,400	
						Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	1	473,500,000	304,853,000	
						Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	1	67,905,000	56,071,600	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp)		PENANGUNG JAWAB
										MURNI	PERUBAHAN	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah					Nilai	74	2,508,851,040	1,728,287,490	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah			Nilai	79.9	82,792,000	54,866,000	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	10,816,000	5,294,000	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7,960,000	5,558,000	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	8,920,000	7,470,000	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3,980,000	2,578,000	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGE T	PAGU ANGGARAN (Rp)		PENANGUNG JAWAB
										MURNI	PERUBAHAN	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	4,940,000	4,730,000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	16	34,904,000	24,358,000	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	11,272,000	4,878,000	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai SAP (Standar akuntansi pemerintahan)			Persen	100	10,500,000	10,500,000	
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	1,500,000	1,500,000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	600,000	600,000	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGE T	PAGU ANGGARAN (Rp)		PENANGUNG JAWAB
										MURNI	PERUBAHAN	
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	2,150,000	2,150,000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	18	5,250,000	5,250,000	
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1,000,000	1,000,000	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN perangkat daerah yang memiliki predikat SKP minimal BAIK			Persen	100	97,878,000	53,880,000	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	72,906,000	35,508,000	
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	24,972,000	18,372,000	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan layanan administrasi umum yang dilaksanakan sesuai standar dan jadwal			Persen	100	481,797,600	379,660,600	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGE T	PAGU ANGGARAN (Rp)		PENANGUNG JAWAB
										MURNI	PERUBAHAN	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	199,270,000	132,278,600	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	20,000,000	20,000,000	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	72,680,000	94,204,600	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	24,000,000	22,872,400	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	165,847,600	110,305,000	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Pelayanan Penunjang Sesuai Jadwal				100	1,835,883,440	1,229,380,890	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Laporan	12	25,800,000	25,800,000	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1,810,083,440	1,203,580,890	
							JUMLAH PAGU ANGGARAN			4,629,612,000	3,077,178,590	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGE T	PAGU ANGGARAN (Rp)		PENANGUNG JAWAB
										MURNI	PERUBAHAN	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi Administrasi Pembangunan	Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Dimanfaatkan									900,000,000	457,500,000	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADAMINISTRASI PEMBANGUNAN
		Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Kebijakan Adminitrasi Pembangunan Yang Ditindaklanjuti					Persen	100	900,000,000	457,500,000	
				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Hasil Rekomendasi Pengendalian Administrasi Pembangunan sebagai Bahan Evaluasi Yang Tersedia			Persen	100	550,000,000	272,000,000	
						Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Laporan	2	250,000,000	130,000,000	
						Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Laporan	2	150,000,000	71,000,000	
						Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Laporan	2	150,000,000	71,000,000	
				Pelaporan Pelaksanaan	Persentase Perumusan Kebijakan Administrasi			Persen	100	350,000,000	185,500,000	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGE T	PAGU ANGGARAN (Rp)		PENANGUNG JAWAB
										MURNI	PERUBAHAN	
					Pembangunan yang tersusun							
						Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	Dokumen	4	100,000,000	53,500,000	
						Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan	2	100,000,000	47,000,000	
						Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen	2	150,000,000	85,000,000	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Ekonomi yang Dimanfaatkan							Persen	100	1,326,480,000	650,016,000	
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti					Persen	100	1,326,480,000	650,016,000	
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Yang Tersedia			Persen	100	536,480,000	220,000,000	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGE T	PAGU ANGGARAN (Rp)		PENANGUNG JAWAB
										MURNI	PERUBAHAN	
						Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen	4	456,480,000	180,000,000	
						Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen	1	80,000,000	40,000,000	
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Perumusan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam Yang Tersedia			Persen	100	290,000,000	157,200,000	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dokumen	5	150,000,000	86,000,000	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen	2	140,000,000	71,200,000	
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Perumusan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD Yang Tersedia					500,000,000	272,816,000	
						Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan	Dokumen	2	260,000,000	139,096,000	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGE T	PAGU ANGGARAN (Rp)		PENANGUNG JAWAB
										MURNI	PERUBAHAN	
							Aneka Usaha					
						Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Dokumen	2	120,000,000	104,760,000	
						Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Dokumen	2	120,000,000	28,960,000	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah							1,780,048,000	1,292,757,928	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah			Nilai		46,892,000	39,784,000	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	15,000,000	15,000,000	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	4,160,000	4,160,000	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGE T	PAGU ANGGARAN (Rp)		PENANGUNG JAWAB
										MURNI	PERUBAHAN	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	5,196,000	5,196,000	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	4,160,000	4,160,000	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	4,160,000	4,160,000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	4,216,000	2,108,000	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	10,000,000	5,000,000	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai SAP (Standar akuntansi pemerintahan)			Persen	100	18,860,000	13,148,000	
						Koordinasi dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan	Dokumen	1	5,798,400	3,014,400	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGE T	PAGU ANGGARAN (Rp)		PENANGUNG JAWAB
										MURNI	PERUBAHAN	
						Akuntansi SKPD	Pelaksanaan Akuntansi SKPD					
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	809,600	809,600	
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	4,424,000	4,224,000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana	Laporan	1	5,508,000	4,800,000	
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DOkumen	1	2,320,000	300,000	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah			Persen	100	191,944,640	204,030,808	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	88,991,640	104,673,608	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	10,000,000	50,000	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paekt	1	53,500,000	40,960,000	
						Penyediaan Barang	Jumlah Paket Barang	Paket	1	8,758,000	31,652,200	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGE T	PAGU ANGGARAN (Rp)		PENANGUNG JAWAB
										MURNI	PERUBAHAN	
						Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	30,480,000	26,480,000	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	215,000	215,000	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persen	100	1,522,351,360	1,035,795,120	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	4,450,000	1,876,000	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1,517,901,360	1,033,919,120	
							JUMLAH PAGU ANGGARAN			4,006,528,000	2,400,273,928	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					Persen	100	2,609,800,000	1,659,784,987	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persen	100	140,000,000	50,820,000	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGE T	PAGU ANGGARAN (Rp)		PENANGUNG JAWAB
										MURNI	PERUBAHAN	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	80,000,000	17,520,000	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7,500,000	5,100,000	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7,500,000	5,100,000	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7,500,000	5,100,000	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7,500,000	5,100,000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	15,000,000	5,400,000	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Dokumen	2	15,000,000	7,500,000	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGE T	PAGU ANGGARAN (Rp)		PENANGUNG JAWAB
										MURNI	PERUBAHAN	
							Perangkat Daerah					
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah			Persen	100	65,000,000	28,775,000	
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	30,000,000	13,200,000	
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	5,000,000	5,000,000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	12	30,000,000	10,575,000	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah			Persen	100	200,000,000	90,463,000	
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	100,000,000	51,550,000	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	100,000,000	38,913,000	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum			Persen		554,800,000	350,590,800	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGE T	PAGU ANGGARAN (Rp)		PENANGUNG JAWAB
										MURNI	PERUBAHAN	
					perangkat daerah							
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	65,000,000	52,842,800	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	100,000,000	88,950,000	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	45,000,000	36,760,000	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	344,800,000	172,038,000	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persen		1,650,000,000	1,139,136,187	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12	1,650,000,000	1,139,136,187	
Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Diimplementasikan	Hubungan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi/Sister Province	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Realisasi Kebijakan Administrasi Kewilayahan					100%		380,000,000	155,363,000	
				Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Ketercapaian Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			Persen		380,000,000	155,363,000	
						Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Dokumen	1	50,000,000	18,815,000	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp)		PENANGUNG JAWAB
										MURNI	PERUBAHAN	
						Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen	2	70,000,000	42,800,000	
						Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Dokumen	3	260,000,000	93,748,000	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah							Nilai	3,49	810,000,000	442,493,000	
		Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Realisasi Kebijakan Administrasi Kewilayahan					Persen	100	810,000,000	442,493,000	
				Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah			Persen	100	810,000,000	442,493,000	
						Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	2	225,000,000	107,725,000	
						Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Dokumen	3	195,000,000	79,231,000	
						Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	4	390,000,000	255,537,000	
Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Diimplementasikan	Hubungan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi/Sister Province							Persen	7	600,000,000	388,006,000	
		Program Pemerintahan	Persentase Realisasi					Persen	100	600,000,000	388,006,000	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGE T	PAGU ANGGARAN (Rp)		PENANGUNG JAWAB
										MURNI	PERUBAHAN	
		dan Otonomi Daerah	Kebijakan Administrasi Kewilayahan									
				Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah			Persen	100	600,000,000	388,006,000	
						Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Dokumen	10	445,000,000	353,842,000	
						Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Dokumen	1	65,000,000	16,754,000	
						Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	Laporan	2	90,000,000	17,410,000	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Dimanfaatkan									27,032,143,000	16,185,291,800	
		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan realisasi Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual					Persen	100	27,032,143,000	16,185,291,800	
			Persentase Rumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					Persen				

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGE T	PAGU ANGGARAN (Rp)		PENANGUNG JAWAB
										MURNI	PERUBAHAN	
			Persentase Rumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					Persen				
				Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual			Persen		25,652,143,000	15,780,331,800	
						Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1 Unit	1	1,200,000,000	1,086,722,000	
						Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	13 Lembaga	13	24,452,143,000	14,693,609,800	
				Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Ketercapaian Jumlah Dokumen kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar			Persen	100	210,000,000	165,000,000	
						Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	1	70,000,000	55,000,000	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGE T	PAGU ANGGARAN (Rp)		PENANGUNG JAWAB
										MURNI	PERUBAHAN	
						Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	1	70,000,000	55,000,000	
						Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen	1	70,000,000	55,000,000	
				Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Ketercapaian Jumlah Dokumen kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar			Persen	100	1,170,000,000	239,960,000	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Dokumen	3	395,000,000	92,480,000	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGE T	PAGU ANGGARAN (Rp)		PENANGUNG JAWAB
										MURNI	PERUBAHAN	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dokumen	3	715,000,000	92,480,000	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Dokumen	1	60,000,000	55,000,000	
							JUMLAH PAGU ANGGARAN			31,431,943,000	18,830,938,787	
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi							Nilai	74	18,351,071,000	21,747,245,289	BIRO UMUM
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program					Nilai	79.9	18,351,071,000	21,747,245,289	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp)		PENANGUNG JAWAB
										MURNI	PERUBAHAN	
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah			Persen	100	127,875,000	133,504,789	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	22,000,000	22,200,000	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	17,000,000	17,000,000	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	17,000,000	17,000,000	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	10,000,000	14,000,000	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	10,000,000	10,000,000	
						Koordinasi dan	Jumlah Laporan	Laporan	1	26,875,000	33,404,789	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGE T	PAGU ANGGARAN (Rp)		PENANGUNG JAWAB
										MURNI	PERUBAHAN	
						Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	25,000,000	19,900,000	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah			Persen	100	105,600,000	30,000,000	
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	7	105,600,000	30,000,000	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persen	100	18,117,596,000	21,583,740,500	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	222,057,000	272,057,000	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	2,723,043,000	3,562,288,000	
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2,000,000,000	2,429,227,500	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGE T	PAGU ANGGARAN (Rp)		PENANGUNG JAWAB
										MURNI	PERUBAHAN	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	13,172,496,000	15,320,168,000	
Meningkatnya kualitas pelayanan SETDA	Indeks Pelayanan Sekretariat Daerah									177,788,996,000	186,021,836,322	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase realisasi pelayanan SETDA					Persen	100	177,788,996,000	186,021,836,322	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah			Persen	100	110,861,928,000	117,010,720,372	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	353	108,447,058,000	115,195,001,372	
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	2,125,470,000	1,542,819,000	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	239,400,000	229,200,000	
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	2	10,000,000	10,000,000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	15,000,000	8,700,000	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGE T	PAGU ANGGARAN (Rp)		PENANGUNG JAWAB
										MURNI	PERUBAHAN	
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	2,000,000	2,000,000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	3	20,000,000	20,000,000	
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	3,000,000	3,000,000	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah			Persen	100	100,000,000	75,822,000	
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	20,000,000	14,000,000	
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	38,000,000	28,774,000	
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	7,000,000	7,000,000	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	35,000,000	26,048,000	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp)		PENANGUNG JAWAB
										MURNI	PERUBAHAN	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persen	100	3,224,649,000	5,334,670,225	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2		1,352,854,900	
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan'	Paket	1	1,432,166,800	2,221,239,325	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	287	1,792,482,200	1,760,576,000	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persen	100	18,674,879,000	21,876,729,150	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	17	1,312,863,000	1,355,863,000	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	111	3,724,265,000	6,515,261,250	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGE T	PAGU ANGGARAN (Rp)		PENANGUNG JAWAB
										MURNI	PERUBAHAN	
						Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	67	21,618,000	27,760,650	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	392	760,000,000	531,917,750	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	4,000,000,000	4,737,393,500	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	3	8,491,973,000	8,491,973,000	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	364,160,000	216,560,000	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Sekretariat Daerah			Persen	100	11,851,631,000	12,487,635,475	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	300,000,000	400,000,000	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	600,000,000	945,448,950	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	335,904,000	273,404,000	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	1	2,750,000,000	2,568,371,000	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGE T	PAGU ANGGARAN (Rp)		PENANGUNG JAWAB
										MURNI	PERUBAHAN	
							Disediakan					
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	600,000,000	800,365,700	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	26,264,000	20,364,000	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	5,750,000,000	5,885,622,825	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1,127,160,000	1,231,756,000	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	362,303,000	362,303,000	
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Persen	100	18,718,509,000	15,582,757,000	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2	14,343,537,000	12,411,629,000	
						Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	1	1,134,972,000	376,128,000	
						Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil	Orang	2	240,000,000	120,000,000	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp)		PENANGUNG JAWAB
										MURNI	PERUBAHAN	
							Kepala Daerah					
						Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	4	3,000,000,000	2,675,000,000	
				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			Persen	100	14,357,400,000	13,653,502,100	
						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	1	7,857,400,000	8,185,341,750	
						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	1	4,500,000,000	3,846,950,600	
						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	1	2,000,000,000	1,621,209,750	
							JUMLAH PAGU ANGGARAN			196,140,067,000	207,769,081,611	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah					Nilai	74	5,487,082,000	3,449,217,400	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah			Nilai	79.9	563,048,000	333,895,000	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	92,342,000	39,115,000	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGE T	PAGU ANGGARAN (Rp)		PENANGUNG JAWAB
										MURNI	PERUBAHAN	
						Perangkat Daerah						
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	7,000,000	6,700,000	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	7,000,000	6,700,000	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	7,000,000	6,700,000	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	7,000,000	6,700,000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	16	41,393,000	35,393,000	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	7	326,927,000	216,481,000	
						Pelaksanaan Pengumpulan Data	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah	Data	1	14,350,000	5,150,000	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGE T	PAGU ANGGARAN (Rp)		PENANGUNG JAWAB
										MURNI	PERUBAHAN	
						Statistik Sektoral Daerah	yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah					
						Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	1	60,036,000	10,956,000	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)			100	100	59,998,000	52,218,000	
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	9,900,000	8,200,000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	5,700,000	3,150,000	
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	4,890,000	4,660,000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	18	37,000,000	33,700,000	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGE T	PAGU ANGGARAN (Rp)		PENANGUNG JAWAB
										MURNI	PERUBAHAN	
							Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	2,508,000	2,508,000	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN perangkat daerah yang memiliki predikat SKP minimal BAIK			%	95	806,529,000	213,702,000	
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	392,555,000	0	
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	25	203,290,000	145,476,000	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	8	210,684,000	68,226,000	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan layanan administrasi umum yang dilaksanakan sesuai standar dan jadwal			%	100	141,790,000	116,635,000	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	6,660,000	3,000,000	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	5	135,130,000	113,635,000	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Pelayanan Penunjang Sesuai Jadwal			%	100	3,915,717,000	2,732,767,400	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGE T	PAGU ANGGARAN (Rp)		PENANGUNG JAWAB
										MURNI	PERUBAHAN	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	3,915,717,000	2,732,767,400	
Meningkatnya Pelayanan Pimpinan	Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan							Indeks	3.2	5,993,729,000	5,369,298,000	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Layanan Materi dan Informasi Pimpinan yang Terpenuhi Sesuai Standar					%	100	5,993,729,000	5,369,298,000	
				Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Kebutuhan Materi, Komunikasi dan Dokumentasi yang di Sampaikan kepada Pimpinan tepat Waktu			%	100	4,188,800,000	3,852,571,000	
						Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	Dokumen	15	700,000,000	616,185,000	
						Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	24	1,758,800,000	1,567,504,000	
						Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Laporan	24	1,730,000,000	1,668,882,000	
				Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Kebutuhan Acara, Kunjungan Tamu dan Hubungan Keprotokolan Pimpinan yang Terfasilitasi			%	100	1,804,929,000	1,516,727,000	
						Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Laporan	13	914,084,000	678,080,000	
						Fasilitasi Kunjungan	Jumlah Laporan	Laporan	12	367,600,000	420,171,000	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGE T	PAGU ANGGARAN (Rp)		PENANGUNG JAWAB
										MURNI	PERUBAHAN	
						Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					
						Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Laporan	12	523,245,000	418,476,000	
							JUMLAH PAGU ANGGARAN			11,480,811,000	8,818,515,400	
TOTAL PAGU ANGGARAN										253,786,078,000	245,137,431,880	SETDA

2.3 Penjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Dalam perjanjian kinerja murni tahun 2025 apabila dilihat dari tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, sasaran dan indikator kinerja utama tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, Berikut disampaikan perjanjian kinerja murni tahun 2025 seperti pada tabel 2.2 dibawah :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Murni Sekretariat Daerah Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Sosial	Proporsi Penduduk Miskin yang mendapatkan Pelayanan Sosial	Persen	77,77
2	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	65,89
3	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita Tahunan yang disesuaikan	Ribu Rupiah	12.348
4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	63,09
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	2-3
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai	76,56

Dari data diatas dapat dilihat bahwa sasaran dan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja tersebut merupakan tugas dan fungsi perangkat daerah teknis, atas dasar tersebut sesuai dengan perubahan rencana kerja tahun 2025 yang berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029, telah

menetapkan 12 sasaran strategis dan 12 indikator kinerja utama perlu adanya perubahan, aka perubahan tersebut diaplikasikan pada perubahan perjanjian kinerja Sekretariat Daerah tahun 2025. Berikut disampaikan Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah tahun 2025 seperti pada tabel 2.3 dibawaht :

Tabel 2.3
Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Diimplementasikan	Hubungan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi/Sister Province	Instansi	7
2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Dimanfaatkan	Persen	100
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	3,49
4	Meningkatnya Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	99,41
5	Meningkatnya Kepatuhan Implementasi Standar Pelayanan Publik yang berkelanjutan	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	94,02
6	Meningkatnya Pelaporan Kinerja yang Informatif	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja	Nilai	11,1
7	Meningkatnya Budaya Kerja ASN	Indeks ASN Berakhlak	Nilai	76
8	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat Daerah yang Prima	Indeks Pelayanan Sekretariat Daerah	Indeks	3,20
9	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Dimanfaatkan	Persen	100
10	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Ekonomi yang Dimanfaatkan	Persen	100
11	Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	89,30
12	Meningkatnya Pelayanan Pimpinan	Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan	Indeks	3,20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja menggambarkan pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten, baik capaian kinerja sasaran/program strategis yang hendak diwujudkan tahun 2025 maupun capaian kinerja keuangannya. Untuk mengukur capaian kinerja sasaran tahun 2025 tersebut disusun berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Dalam mengukur kinerja sasaran strategis yang didukung oleh pembiayaan program dan kegiatan, indikator yang digunakan adalah indikator *absolut*. Capaian *absolut* dirumuskan dari hubungan sebab akibat antara sasaran strategis dengan program dan kegiatan pendukung, oleh karena itu pengukuran tetap dimulai dari pengukuran kinerja kegiatan dalam mengukur keberhasilan suatu sasaran strategis.

Pada sub bab akuntabilitas kinerja ini diuraikan akuntabilitas kinerja sasaran dan indikator kinerja tahun 2025 sesuai dengan perubahan perjanjian kinerja tahun 2025, selain akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diinformasikan pula capaian kinerja keuangan pada tahun 2025 yang mendukung sasaran strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Laporan capaian kinerja tahun 2025 sesuai dengan sasaran

strategis dan indikator kinerja memuat analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

3.1 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah

Target kinerja Sekretariat Daerah tahun 2025 berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terdapat 12 sasaran strategis dengan 12 indikator kinerja dengan hasil capaian sebagai berikut :

3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2025.

- **Sasaran strategis pertama** : Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Diimplementasikan dengan indikator Hubungan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi/Sister Province (Instansi) penanggung jawab Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Adapun capaian indikator Hubungan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi/Sister Province, tercapai 142,86% dari target tahun 2025 yaitu sebanyak 7 kerjasama dan realisasi 10 kerjasama yang terfasilitasi dan tertandatangani.
- **Sasaran strategis kedua** : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Dimanfaatkan, penanggung

jawab Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah/Biro Kesejahteraan Rakyat. Adapun capaian indikator Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Dimanfaatkan tercapai 100% dari target tahun 2025 yaitu 100% dan realisasinya 100%.

- **Sasaran strategis ketiga** : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan indikator Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, penanggung jawab Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Adapun capaian indikator Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perhitungannya menggunakan perbandingan hasil capaian nilai tahun 2024 dibagi dengan nilai target tahun 2025, hal tersebut disebabkan karena nilai tahun 2025 keluar tahun 2026, sehingga tidak dapat masuk pada isian laporan ini, atas dasar tersebut maka capaian diawal tahun 2025 indikator Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah 98,85% dari target tahun 2025 yaitu dengan nilai 3,49 dan realisasinya 3,45.
- **Sasaran strategis keempat** : Meningkatnya Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi dengan indikator Indeks Reformasi Hukum penanggung jawab Biro Hukum. Adapaun capaian indikator Indeks Reformasi Hukum ditargetkan mendapat nilai 99,41, dengan realisasi 99.64 Kategori AA (Istimewa) Hasil Penilaian Kementrian Hukum, dengan capaian 100,23%.
- **Sasaran strategis kelima** : Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Implementasi Standar Pelayanan Publik yang berkelanjutan dengan indikator Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik yang diamanatkan pada Biro Organisasi. Adapun capaian kinerja Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik adalah 95,22% dari target tahun 2025 sebesar 94,02 dan realisasi sebesar 89,53, nilai realisasi didapat dari perjumlahan nilai dua kategori yaitu Kategori Kualitas Pelayanan dengan nilai 79,53 (baik) dan Kategori Tingkat Kepatuhan mendapat nilai kualifikasi kepatuhan tinggi mendapat skor 10, sesuai

surat yang ditujukan kepada Gubernur Banten dari Ombudsman Republik Indonesia, surat Nomor R/244/PC.05/I/2026 tanggal 26 Januari 2026 Perihal Penyampaian Opini Ombudsman RI : Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025.

- **Sasaran strategis keenam** : Meningkatnya Pelaporan Kinerja yang Informatif dengan indikator Nilai Komponen Pelaporan Kinerja penanggung jawab Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi. Adapun capaian indikator Nilai Komponen Pelaporan Kinerja adalah 96,33% dari target tahun 2025 yaitu mendapat nilai 11,17 dan realisasinya 10,76.
- **Sasaran strategis ketujuh** : Meningkatnya Budaya Kerja ASN dengan indikator Indeks ASN Berakhlak (Nilai) penanggung jawab Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi. Adapun capaian target indikator Indeks ASN Berakhlak, tahun 2025 Kemenpan-RB tidak melakukan penilaian indeks ASN BerAKHLAK atas hal tersebut realisasi capaian kinerja mengacu pada hasil realisasi tahun 2024 yaitu sebesar 75,8, adapun target tahun 2025 mendapat nilai 76, sehingga capaian kinerja atas target sebesar 99,73%
- **Sasaran strategis kedelapan** : Meningkatnya Pelayanan Sekretariat Daerah dengan indikator Indeks Pelayanan Sekretariat Daerah (Indeks) penanggung jawab Biro Umum. Adapun capaian indikator Indeks Pelayanan Sekretariat Daerah sebesar 107,81% dari target tahun 2025 yaitu mendapat nilai 3,20, dengan realisasi 3,45, data tersebut didapat hasil survei mandiri tentang kepuasan layanan;
- **Sasaran strategis kesembilan** : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan dengan indikator Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Dimanfaatkan (%) yang diamanatkan kepada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan. Adapun capaian target indikator Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Dimanfaatkan adalah 100% dari target tahun 2025 yaitu sebesar 100%, dimana data pendukung atas capaian tersebut adalah dalam sub kegiatan Fasilitasi

Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah memiliki target 2 Dokumen dengan realisasi 2 dokumen.

- **Sasaran strategis kesepuluh** : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator Persentase Kebijakan Ekonomi yang Dimanfaatkan penanggung jawab Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Adapaun capaian target indikator Persentase Kebijakan Ekonomi yang Dimanfaatkan adalah 100% dari target tahun 2025 yaitu sebesar 100%, dengan realisasi 100%.
- **Sasaran strategis kesebelas** : Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Nilai) penanggung jawab Biro Pengadaan Barang/Jasa. Adapun capaian target indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa sebesar **104.85%**, dari target tahun 2025 yaitu mendapat nilai **89,30** dengan realisasi **93,63**;
- **Sasaran strategis keduabelas** : Meningkatnya Pelayanan Pimpinan dengan indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan (Indeks) penanggung jawab Biro Administrasi Pimpinan. Adapun capaian indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan sebesar **108,13%** dari target tahun 2025 yaitu mendapat nilai **3,20**, dengan realisasi **3,46**, nilai tersebut didapat hasil survei mandiri yang dilakukan tentang kepuasan layanan pimpinan.

3.1.2 Capaian kinerja dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

- **Sasaran strategis pertama** : Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Diimplementasikan dengan indikator Hubungan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi/Sister Province (Instansi) penanggung jawab Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Dari aspek realisasi indikator Hubungan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi/Sister Province jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada peningkatan, dimana pada tahun 2024 terdapat 6 kerjasama yang masih

berlaku dan tahun 2025 bertambah menjadi 10 kerjasama yang sudah ditindak lanjuti dengan Perjanjian kerjasama

- **Sasaran strategis kedua** : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Dimanfaatkan, penanggung jawab Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah/Biro Kesejahteraan Rakyat. Dari aspek realisasi indikator Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Dimanfaatkan di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya

Capaian Tahun			
2022	2023	2024	2025
100%	100%	100%	100%

- **Sasaran strategis ketiga** : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan indikator Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, penanggung jawab Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Dilihat dari realisasi indikator Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya selalu ada peningkatan.

Nilai Tahun			
2022	2023	2024	Awal 2025
2,73	3,5492	3,4512	3,4512
Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Ke 17	Ke 12	Ke 9	Ke 9

- **Sasaran strategis keempat** : Meningkatnya Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi dengan indikator Indeks Reformasi Hukum penanggung jawab Biro Hukum. Dilihat dari realisasi Indeks Reformasi Hukum belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator tersebut baru menjadi target kinerja pada tahun 2025.

Nilai Tahun			
2022	2023	2024	2025
77,20	97,64	99,40	99,64

- **Sasaran strategis kelima** : Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Implementasi Standar Pelayanan Publik yang berkelanjutan dengan indikator Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik yang diamanatkan kepada Biro Organisasi. Dengan data realisasi sebagai berikut :

Nilai Tahun			
2022	2023	2024	2025
67,18	91,16	94,01	89,53

Dari data diatas untuk periode tahun 2022-2024 nilai realisasi menunjukkan peningkatan karena penilaian masih berpedoman pada Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 333), sedangkan untuk tahun 2025 penilaian berpedoman pada Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2025 Tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dimana ada perbedaan dalam obyek dan pengukuran penilaian.

- **Sasaran strategis keenam** : Meningkatnya Pelaporan Kinerja yang Informatif dengan indikator Nilai Komponen Pelaporan Kinerja penanggung jawab Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi. Dilihat dari realisasi indikator Nilai Komponen Pelaporan Kinerja dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya selalu ada peningkatan meskipun capaiannya tidak sesuai target, berikut nilai capaian periode 2023-2025 :

NILAI TAHUN		
2023	2024	2025
10,24	10,72	10,76

- **Sasaran strategis ketujuh** : Meningkatnya Budaya Kerja ASN dengan indikator Indeks ASN Berakhlak (Nilai) penanggung jawab Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi. Dilihat dari realisasi Indeks ASN Berakhlak belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator tersebut baru menjadi target kinerja pada tahun 2025.

2023	2024	2025
58.9	75.8	75.8

- **Sasaran strategis kedelapan** : Meningkatnya Pelayanan Sekretariat Daerah dengan indikator Indeks Pelayanan Sekretariat Daerah (Indeks) penanggung jawab Biro Umum. Dilihat dari realisasi Indeks Pelayanan Sekretariat Daerah belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator tersebut baru menjadi target kinerja pada tahun 2025.

Nilai Tahun			
2022	2023	2024	2025
N/A	N/A	N/A	3,45

- **Sasaran strategis kesembilan** : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan dengan indikator Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Dimanfaatkan (%) penanggung jawab Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan. Dilihat dari realisasi Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Dimanfaatkan, setiap tahunnya :

Nilai Tahun			
2022	2023	2024	2025
100%	100%	100%	100%

- **Sasaran strategis kesepuluh** : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator Persentase Kebijakan Ekonomi yang Dimanfaatkan penanggung jawab Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan. Dilihat dari realisasi Persentase Kebijakan

Ekonomi yang Dimanfaatkan, setiap tahunnya :

Nilai Tahun			
2022	2023	2024	2025
100	100	71,43	100

- **Sasaran strategis kesebelas** : Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Nilai) penanggung jawab Biro Pengadaan Barang/Jasa. Dilihat dari realisasi Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dibandingkan dengan tahun sebelumnya selalu mengalami peningkatan.

Nilai Tahun			
2022	2023	2024	2025
N/A	88,59	89,23	93,63

- **Sasaran strategis keduabelas** : Meningkatnya Pelayanan Pimpinan dengan indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan (Indeks) penanggung jawab Biro Administrasi Pimpinan. Dilihat dari realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator tersebut baru menjadi target kinerja pada tahun 2025.

Nilai Tahun			
2022	2023	2024	2025
NA	NA	NA	3,46

3.1.3 Capaian kinerja dibandingkan dengan target akhir Renstra

- **Sasaran strategis pertama** : Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Diimplementasikan dengan indikator Hubungan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi/Sister Province (Instansi) penanggung jawab Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, Hubungan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi/Sister Province tahun 2025 sudah mencapai

90,91% dari target akhir RENSTRA yaitu sebanyak 11 kerjasama dan sampai dengan tahun 2025 terealisasi sebanyak 10 kerjasama.

- **Sasaran strategis kedua** : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Dimanfaatkan, penanggung jawab Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah/Biro Kesejahteraan Rakyat. Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Dimanfaatkan tahun 2025 sesuai target akhir RENSTRA adalah sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% ditahun 2025.
- **Sasaran strategis ketiga** : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan indikator Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, penanggung jawab Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2025 sesuai target akhir RENSTRA sebesar 3,64, apabila dilihat hasil capaian tahun 2024 sebesar 3,45 poin atau 94,78%, maka kurang 0,19 poin.
- **Sasaran strategis keempat** : Meningkatnya Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi dengan indikator Indeks Reformasi Hukum penanggung jawab Biro Hukum. Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, Indeks Reformasi Hukum tahun 2025 sudah melebihi target akhir Renstra yaitu sebesar 100,11%, dari target akhir RENSTRA sebesar 99,46 poin dan terealisasi 99,64 poin di tahun 2025.
- **Sasaran strategis kelima** : Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Implementasi Standar Pelayanan Publik yang berkelanjutan dengan indikator Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik yang diamanatkan pada Biro Organisasi. Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik target akhir RENSTRA sebesar 94,10 poin dan terealisasi di tahun 2025 sebesar 89,53 atau 95,14%,

sehingga masih kurang 4,57 poin.

- **Sasaran strategis keenam** : Meningkatnya Pelaporan Kinerja yang Informatif dengan indikator Nilai Komponen Pelaporan Kinerja penanggung jawab Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi. Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, Nilai Komponen Pelaporan Kinerja target akhir RENSTRA yaitu 13,50 poin atau masih kurang 2,74 dari nilai realisasi tahun 2025 sebesar 10,76 atau 79,70%;
- **Sasaran strategis ketujuh** : Meningkatnya Budaya Kerja ASN dengan indikator Indeks ASN Berakhlak (Nilai) penanggung jawab Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi. Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, Indeks ASN Berakhlak target akhir RENSTRA yaitu 78.00 poin, realisasi tahun 2024 sebesar 75,80, sehingga masih kurang sebesar 2.2 poin.
- **Sasaran strategis kedelapan** : Meningkatnya Pelayanan Sekretariat Daerah dengan indikator Indeks Pelayanan Sekretariat Daerah (Indeks) penanggung jawab Biro Umum. Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, Indeks Pelayanan Sekretariat Daerah terhadap target akhir RENSTRA yaitu 3,80 poin baru mencapai 3,45 atau kurang 0,35 poin dari realisasi tahun 2025.
- **Sasaran strategis kesembilan** : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan dengan indikator Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Dimanfaatkan (%) penanggung jawab Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan. Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Dimanfaatkan terhadap target akhir RENSTRA yaitu 100% sudah tercapai.
- **Sasaran strategis kesepuluh** : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator Persentase Kebijakan Ekonomi yang Dimanfaatkan penanggung jawab Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan. Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, Persentase Kebijakan Ekonomi yang

Dimanfaatkan terhadap target akhir RENSTRA yaitu 100% pada tahun 2025 sudah tercapai;

- **Sasaran strategis kesebelas** : Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Nilai) penanggung jawab Biro Pengadaan Barang/Jasa. Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa terhadap target akhir RENSTRA yaitu sebesar 90,80, realisasi tahun 2025 sebesar 93,63, atau capaian 103,12% sudah melebihi target akhir Renstra.
- **Sasaran strategis kedua belas** : Meningkatnya Pelayanan Pimpinan dengan indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan (Indeks) penanggung jawab Biro Administrasi Pimpinan. Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan terhadap target akhir RENSTRA yaitu 3,80 poin tahun 2025 baru mencapai 3,46 atau kurang 0,44 poin.

3.1.4 Capaian kinerja dibandingkan dengan target Nasional.

- **Sasaran strategis pertama** : Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Diimplementasikan dengan indikator Hubungan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi/Sister Province (Instansi) penanggung jawab Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Pada tingkat nasional, Indikator kinerja Hubungan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi/Sister Province belum dapat diperbandingkan dengan provinsi lain atau secara nasional, sehubungan kerjasama antara daerah dilakukan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.
- **Sasaran strategis kedua** : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Dimanfaatkan, penanggung jawab Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah/Biro Kesejahteraan Rakyat. Pada tingkat nasional, Indikator kinerja Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Dimanfaatkan belum dapat diperbandingkan dengan provinsi lain atau secara nasional, sehubungan kebijakan

daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing.

- **Sasaran strategis ketiga** : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan indikator Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, penanggung jawab Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Pada tingkat nasional, Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk pada 10 besar nilai tertinggi yaitu berada pada urutan 9 dengan kategori baik;
- **Sasaran strategis keempat** : Meningkatnya Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi dengan indikator Indeks Reformasi Hukum penanggung jawab Biro Hukum. Pada tingkat nasional, Indikator kinerja Indeks Reformasi Hukum merupakan nilai tertinggi bila diperbandingkan dengan Provinsi lain atau secara Nasional. Sesuai dengan Surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum RI Nomor PPH-OT.03.01-340 Tanggal 13 Oktober 2025 Hal Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025.

Nilai Provinsi			
Banten	DKI Jakarta	Jawa Barat	Lampung
99,64	94,20	95,85	96,54

- **Sasaran strategis kelima** : Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Implementasi Standar Pelayanan Publik yang berkelanjutan dengan indikator Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik yang diamanatkan pada Biro Organisasi. Penilaian Tahun 2025 dengan format penilaian dan penyampaian hasil penilaian yang berbeda yang tidak menampilkan penilaian daerah lain sehingga belum bisa diperbandingkan.
- **Sasaran strategis keenam** : Meningkatnya Pelaporan Kinerja yang Informatif dengan indikator Nilai Komponen Pelaporan

Kinerja penanggung jawab Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi. Pada tingkat nasional, Nilai Komponen Pelaporan Kinerja masih dibawah provinsi-provinsi lain sehingga perlu dilaksanakan peningkatan dan inovasi untuk mendukung peningkatan nilai tersebut, baik perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasinya.

- **Sasaran strategis ketujuh** : Meningkatnya Budaya Kerja ASN dengan indikator Indeks ASN Berakhlak (Nilai) penanggung jawab Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi. Pada tingkat nasional, Indeks ASN Berakhlak masih dibawah provinsi-provinsi lain sehingga perlu dilaksanakan peningkatan dan inovasi untuk mendukung peningkatan nilai tersebut.
- **Sasaran strategis kedelapan** : Meningkatnya Pelayanan Sekretariat Daerah dengan indikator Indeks Pelayanan Sekretariat Daerah (Indeks) penanggung jawab Biro Umum. Pada tingkat nasional atau Provinsi tetangga, Indeks Pelayanan Sekretariat Daerah masih belum dapat diperbandingkan.
- **Sasaran strategis kesembilan** : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan dengan indikator Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Dimanfaatkan (%) penanggung jawab Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan. Pada tingkat nasional atau Provinsi tetangga, Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Dimanfaatkan masih belum dapat diperbandingkan.
- **Sasaran strategis kesepuluh** : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator Persentase Kebijakan Ekonomi yang Dimanfaatkan penanggung jawab Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan. Pada tingkat nasional atau Provinsi tetangga, Persentase Kebijakan Ekonomi yang Dimanfaatkan masih belum dapat diperbandingkan.
- **Sasaran strategis kesebelas** : Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan indikator Indeks Tata

Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Nilai) penanggung jawab Biro Pengadaan Barang/Jasa. Pada tingkat nasional atau Provinsi tetangga, Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa, Provinsi Banten menunjukkan capaian yang berada pada kategori sangat baik, namun masih memerlukan peningkatan pada aspek konsistensi penerapan regulasi, transparansi proses pengadaan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia.

- **Sasaran strategis keduabelas** : Meningkatnya Pelayanan Pimpinan dengan indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan (Indeks) penanggung jawab Biro Administrasi Pimpinan. Pada tingkat nasional atau Provinsi tetangga, Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan masih belum dapat diperbandingkan.

3.1.5 Analisis faktor penyebab keberhasilan/kegagalan capaian kinerja.

- **Sasaran strategis pertama** : Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Diimplementasikan dengan indikator Hubungan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi/Sister Province (Instansi) penanggung jawab Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Hubungan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi/Sister Province adalah sebagai berikut :

Faktor Pertama : Beberapa tindaklanjut Kesepakatan Bersama berupa Perjanjian Kerjasama (PKS) sebagai berikut :

1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah provinsi banten dengan Kejaksaan tinggi banten;
2. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Dewa United Banten Football Club
3. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan

Adhyaksa Banten FC

4. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Banten dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
5. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
6. Kesepakatan Bersama Antara Pemprov DKI, Pemprov Jabar, Pemprov Jateng, Pemprov DIY, Pemprov Bali, Pemprov Lampung, Pemprov Banten, Pemprov NTB, Pemprov NTT.
7. Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dengan Pemerintah Provinsi Banten

Faktor Kedua : Terasilitasi anggarannya bagi Pemerintah Provinsi yang melakukan Kerja Sama

- **Sasaran strategis kedua** : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Dimanfaatkan, penanggung jawab Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah/Biro Kesejahteraan Rakyat. faktor yang mempengaruhi keberhasilan /kegagalan pencapaian Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Dimanfaatkan adalah dengan terbitnya Surat Edaran Nomor: 49 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan Dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS)
- **Sasaran strategis ketiga** : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan indikator Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, penanggung jawab Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian Skoring/Nilai Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

Faktor Keberhasilan

Faktor pertama : Kepemimpinan yang kuat dan visioner

Faktor kedua : Komitmen dan partisipasi seluruh stakeholder'

Faktor ketiga : Ketersediaan sumber daya, termasuk anggaran, SDM, dan infrastruktur

Faktor keempat : Sistem manajemen yang efektif, termasuk sistem perencanaan, penganggaran, dan pengawasan

Faktor kelima : Transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Faktor Kegagalan :

Faktor Pertama : Sering Berubahnya Peraturan untuk menetapkan Indikator Kinerja Kunci

Faktor Kedua : seringnya pergantian Aparatur di Perangkat Daerah yang memahami di bidang LPPD

Faktor ketiga : Aplikasi Pusat terkendala jaringan, karena pada saat yang bersamaan Pemerintah Provinsi kabupaten dan Kota menggunakan Aplikasi yang sama

Faktor kelima : tidak tersedia anggaran yang memadai, apalagi terkait pelaksanaan Urusan Pelayanan Dasar

Faktor keenam : Kurangnya komitmen dari pimpinan dan stakeholder.

- **Sasaran strategis keempat** : Meningkatnya Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi dengan indikator Indeks Reformasi Hukum penanggung jawab Biro Hukum. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Indeks Reformasi Hukum adalah sebagai berikut :

- Faktor Pertama : Adanya Komitmen politik yang kuat dari pemerintah dan legislatif untuk melakukan reformasi hukum
- Faktor Kedua : Tahapan sudah sesuai dan dilaksanakan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Faktor Ketiga : Sinergitas dan Kolaborasi Pemerintah Provinsi Banten dengan Kementerian Hukum.
- **Sasaran strategis kelima** : Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Implementasi Standar Pelayanan Publik yang berkelanjutan dengan indikator Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik yang diamanatkan pada Biro Organisasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik adalah sebagai berikut :
- Faktor Pertama : Adanya regulasi baru yang menjadi pedoman dalam penilaian dimana rumusan penilaiannya berubah sedangkan target indikator kinerja tahun 2025 mengacu pada regulasi lama;
- Faktor Kedua : Inovasi Teknologi (Digitalisasi). Penggunaan sistem berbasis internet (*Internet of Things*) untuk mempercepat layanan, mengurangi tatap muka dan menekan maladministrasi.
- Faktor Ketiga : Kurang meratanya Pemenuhan Standar Pelayanan pada Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan turunannya. Termasuk maklumat

pelayanan serta pemenuhan evidence 6 komponen service delivery dan 8 komponen manufacturing.

Faktor Keempat : Sinergi dengan Ombudsman RI. Kerjasama aktif dalam bentuk workshop, pendampingan dan evaluasi sebelum penilaian dilakukan. Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Banten telah memiliki Nota Kesepakatan dengan Ombudsman Republik Indonesia Nomor: 91/ORI-MOU/VII/2023 dan Nomor : 120.23/NK.10-Huk/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Ombudsman RI serta PJ. Gubernur Banten dengan objek yang dikerjasamakan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik.

- **Sasaran strategis keenam** : Meningkatnya Pelaporan Kinerja yang Informatif dengan indikator Nilai Komponen Pelaporan Kinerja penanggung jawab Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian Nilai Komponen Pelaporan Kinerja adalah sebagai berikut :

Faktor Pertama : Perencanaan Kinerja Berpengaruh sangat besar keberhasilan jika:

- Tujuan, sasaran, dan indikator kinerja jelas, spesifik, dan terukur (SMART)
- Indikator kinerja selaras antara Renstra – Rencana Kinerja Tahunan – Perjanjian Kinerja
- Target realistis dan berbasis data

Penyebab kegagalan jika:

- Indikator kinerja terlalu umum atau normatif

- Tidak ada keterkaitan logis antara program, kegiatan, dan outcome
- Target ditetapkan asal atau tidak berbasis analisis

Faktor Kedua : Kualitas Indikator Kinerja

Berhasil jika:

- Indikator mengukur outcome/impact, bukan hanya output
- Definisi operasional indikator jelas
- Ada satuan ukur, rumus, dan sumber data yang konsisten

Gagal jika:

- Indikator tumpang tindih atau tidak relevan
- Menggunakan indikator proses sebagai indikator hasil
- Tidak ada baseline atau pembandingan

Faktor Ketiga : Kualitas Data dan Bukti Dukung Sangat krusial dalam penilaian pelaporan

Berhasil jika:

- Data kinerja valid, konsisten, dan dapat ditelusuri
- Bukti dukung lengkap (dokumen, laporan, notulen, SK, foto, dsb.)
- Ada sistem pengelolaan data kinerja

Gagal jika:

- Data tidak sinkron antar dokumen
- Bukti dukung tidak tersedia atau tidak relevan
- Perhitungan capaian tidak bisa diverifikasi

Faktor Keempat : Kualitas Analisis dalam Laporan Sering menjadi titik lemah

Mendukung keberhasilan:

- Analisis menjawab mengapa target tercapai/tidak tercapai

- Ada analisis efisiensi dan efektivitas
 - Disertai solusi dan rencana perbaikan
- Penyebab kegagalan:

- Laporan hanya deskriptif (narasi angka)
- Tidak ada analisis sebab-akibat
- Tidak membahas perbandingan antar tahun

Faktor Kelima : Keterkaitan Kinerja dan Anggaran
Penilaian penting pada reformasi birokrasi

Berhasil jika:

- Anggaran berbasis kinerja (money follows program)
- Ada analisis efisiensi penggunaan anggaran
- Capaian kinerja dikaitkan dengan realisasi anggaran

Gagal jika:

- Anggaran besar tapi capaian kinerja rendah
- Tidak ada analisis cost-effectiveness
- Program tidak mendukung sasaran strategis

Faktor ke enam : Kepemimpinan dan Komitmen Organisasi
Faktor non-teknis yang sangat menentukan

Mendukung keberhasilan:

- Pimpinan memahami dan mendorong budaya kinerja
- Ada pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas
- Kinerja menjadi dasar pengambilan keputusan

Penyebab kegagalan:

- Pelaporan kinerja dianggap sekadar kewajiban administrasi
- Kurangnya komitmen lintas unit
- Perubahan kebijakan tidak dikawal

Faktor Ketujuh : Kompetensi SDM Penentu kualitas dokumen pelaporan

Berhasil jika:

- SDM memahami SAKIP dan manajemen kinerja
- Ada pendampingan dan peningkatan kapasitas
- Tim penyusun laporan stabil

Gagal jika:

- SDM sering berganti
- Minim pelatihan
- Ketergantungan pada pihak tertentu

- **Sasaran strategis ketujuh** : Meningkatnya Budaya Kerja ASN dengan indikator Indeks ASN Berakhlak (Nilai) penanggung jawab Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian Indeks ASN Berakhlak adalah sebagai berikut :

Faktor Pertama : Kebijakan dan Kepemimpinan, faktor ini sangat berpengaruh terhadap pencapaian indeks ASN berakhlak berhasil jika: Pimpinan berkomitmen kuat dan menjadi *role model* nilai BerAKHLAK. Nilai BerAKHLAK diintegrasikan ke dalam kebijakan, perjanjian kinerja, dan penilaian ASN. Serta ada regulasi internal (SE, SK, pedoman) yang jelas. Dan Gagal jika: Pimpinan kurang memberi teladan atau hanya bersifat formalitas. Nilai BerAKHLAK tidak diturunkan ke

kebijakan teknis/unit kerja. Tidak ada penguatan kebijakan atau tindak lanjut nyata.

Faktor ke dua : Pemahaman dan Internalisasi ASN, faktor ini juga merupakan faktor keberhasilan indeks ASN Berakhlak karena ASN memahami makna dan perilaku konkret dari nilai Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif. ASN mampu menerapkan nilai BerAKHLAK dalam tugas sehari-hari. Dan ada faktor kegagalan juga jika ASN hanya menghafal jargon tanpa memahami implementasi. Tidak ada contoh praktik nyata di unit kerja.

Faktor ke tiga : Budaya Organisasi berhasil jika Budaya kerja mendukung pelayanan prima, kolaborasi, dan integritas, Lingkungan kerja terbuka terhadap inovasi dan perubahan, dan Nilai BerAKHLAK menjadi kebiasaan, bukan sekadar slogan. Dan gagal jika Budaya kerja lama (ego sektoral, birokratis, resistensi perubahan) masih dominan. Keteladanan tidak konsisten antar unit/pimpinan. Praktik menyimpang dibiarkan tanpa sanksi.

Faktor ke empat : Sistem dan Manajemen SDM berhasil jika Nilai BerAKHLAK terintegrasi dalam Rekrutmen dan promosi, Penilaian kinerja, Pengembangan kompetensi, Sistem penghargaan dan sanksi, dan Ada indikator kinerja yang terukur. Gagal jika Sistem SDM tidak mendukung penerapan nilai

BerAKHLAK, Tidak ada konsekuensi terhadap pelanggaran nilai, Penilaian kinerja bersifat administratif dan tidak objektif.

Faktor ke lima : Monitoring, Evaluasi, dan Data Dukung. Berhasil jika Ada monitoring dan evaluasi berkala, Data pendukung indeks (survei, eviden kegiatan, dokumentasi) lengkap dan valid, dan Tindak lanjut hasil evaluasi dilakukan secara konsisten. Dan Gagal jika Pengisian data indeks tidak berbasis fakta, Eviden tidak lengkap atau tidak sesuai indikator, dan Hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti.

Faktor ke enam : Komunikasi dan Agen Perubahan. Berhasil jika Agen perubahan ASN BerAKHLAK aktif dan berfungsi, Komunikasi internal efektif dan berkesinambungan, dan Praktik baik (*best practices*) dibagikan lintas unit. Dan Gagal jika Agen perubahan hanya formalitas, Komunikasi satu arah dan tidak menyentuh ASN pelaksana, dan Tidak ada diseminasi praktik baik.

- **Sasaran strategis kedelapan** : Meningkatnya Pelayanan Sekretariat Daerah dengan indikator Indeks Pelayanan Sekretariat Daerah (Indeks) penanggung jawab Biro Umum. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Indeks Pelayanan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

Faktor Pertama : Sarana dan Prasana pendukung

Faktor Kedua : Layanan informasi direspon dengan cepat dan sigap

- **Sasaran strategis kesembilan** : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan dengan indikator

Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Dimanfaatkan (%) penanggung jawab Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dengan terbitnya 2 kebijakan yaitu Nota Keuangan Perubahan APBD 2025 dan Nota Keuangan Raperda Provinsi Banten tentang APBD TA. 2026.

- **Sasaran strategis kesepuluh** : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator Persentase Kebijakan Ekonomi yang Dimanfaatkan penanggung jawab Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian Persentase Kebijakan Ekonomi yang Dimanfaatkan dengan terbitnya 12 kebijakan berikut :

1. Peraturan Gubernur Banten Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah;
2. Keputusan Gubernur Banten Nomor 401 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Banten;
3. Keputusan Gubernur Banten Nomor 402 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Provinsi Banten;
4. Keputusan Gubernur Banten Nomor 455 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Banten;
5. Keputusan Gubernur Banten Nomor 76 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penilai Permohonan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Ciligrang dan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Labuan Provinsi Banten;
6. Keputusan Gubernur Banten Nomor 214 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penilai Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan

Daerah;

7. Keputusan Gubernur Banten Nomor 132 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penilai Permohonan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Tangerang;
 8. Keputusan Gubernur Banten Nomor 255 Tahun 2025 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Tangerang;
 9. Keputusan Gubernur Banten Nomor 364 Tahun 2025 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Laboratorium Kesehatan Daerah;
 10. Keputusan Gubernur Banten Nomor 89 Tahun 2025 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Labuan dan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Ciligrang Provisinis Banten;
 11. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa BUMD;
 12. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pernyataan Modal Daerah Kedalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (PERSERODA) Terbuka.
- **Sasaran strategis kesebelas** : Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Nilai) penanggung jawab Biro Pengadaan Barang/Jasa. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :
- Faktor Pertama : Kualitas perencanaan pengadaan, khususnya ketepatan penyusunan RUP dan kesesuaian dengan dokumen perencanaan dan penganggaran
- Faktor Kedua : Kepatuhan terhadap regulasi dan standar operasional prosedur, baik dalam pelaksanaan pemilihan penyedia maupun pengelolaan kontrak

- Faktor Ketiga : Dukungan kebijakan dan komitmen pimpinan perangkat daerah, dalam mendorong tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel
- Faktor Keempat : Koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah, terutama dalam penyelarasan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengadaan
- Faktor Kelima : Faktor eksternal, seperti perubahan regulasi nasional, keterbatasan waktu pelaksanaan, serta dinamika kebutuhan program dan kegiatan.
- **Sasaran strategis keduabelas** : Meningkatnya Pelayanan Pimpinan dengan indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan (Indeks) penanggung jawab Biro Administrasi Pimpinan. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan adalah sebagai berikut :
 - Faktor Pertama : Ketepatan, kecepatan, konsistensi, dan profesionalisme dalam pemberian pelayanan pimpinan
 - Faktor Kedua : Etika, keramahan, empati, serta komitmen pelaksana layanan dalam mendukung kebutuhan pimpinan

3.1.6 Analisis atas efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja.

Metode perhitungan efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerjaanggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dengan rumusan perhitungan sebagai berikut :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Capaian RO (CRO)	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO)-RARO	EFISIENSI (%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) x (1)	(5) = (4)- (3)	(6) = (5) / (2)

- **Sasaran strategis pertama** : Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Diimplementasikan dengan indikator Hubungan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi/Sister Province (Instansi) penanggung jawab Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, adapun Efisiensi kinerjaanggaran sebesar 45,88% dengan perhitungan sebagai berikut :

Capaian RO (CRO)	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO)-RARO	EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) x (1)	(5) = (4)- (3)	(6) = (5) / (2)
142.86%	353,842,000	343,158,170	505,498,681	162,340,511	45.88%

- **Sasaran strategis kedua** : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Dimanfaatkan, penanggung jawab Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah/Biro Kesejahteraan Rakyat. Anggaran yang mendukung untuk capaian sasaran strategis diatas diberikan pagu sebesar Rp 165.000.000,- realisasi sebesar Rp 122.992.500,- adapun Efisiensi kinerjaanggaran sebesar 25,46% dengan perhitungan sebagai berikut :

Capaian RO (CRO)	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO)-RARO	EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) x (1)	(5) = (4)- (3)	(6) = (5) / (2)
100.00%	165,000,000	122,992,500	165,000,000	42,007,500	25.46%

- **Sasaran strategis ketiga** : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan indikator Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah, penanggung jawab Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Anggaran yang mendukung untuk capaian sasaran strategis diatas dengan pagu sebesar Rp 985.862.000,- terealisasi sebesar Rp 911,789,106,- dengan efisiesi 6,36%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Capaian RO (CRO)	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO)-RARO	EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) x (1)	(5) = (4)- (3)	(6) = (5) / (2)
98.85%	985,862,000	911,789,106	974,524,587	62,735,481	6.36%

- **Sasaran strategis keempat** : Meningkatnya Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi dengan indikator Indeks Reformasi Hukum penanggung jawab Biro Hukum. Anggaran yang mendukung untuk capaian sasaran strategis di atas diberikan pagu sebesar Rp. 1,853,760,800,- terealisasi sebesar Rp. 1,698,047,498,- dengan efisiensi anggaran sebesar 8,63% dengan perhitungan sebagai berikut :

Capaian RO (CRO)	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO)-RARO	EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) x (1)	(5) = (4)- (3)	(6) = (5) / (2)
100.23%	1,853,760,800	1,698,047,498	1,858,024,450	159,976,952	8.63%

- **Sasaran strategis kelima** : Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Implementasi Standar Pelayanan Publik yang berkelanjutan dengan indikator Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik yang diamanatkan pada Biro OrganisasiMeningkatnya Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik didukung oleh Program Penataan Organisasi dan Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja. Anggaran yang mendukung untuk capaian sasaran strategis diatas diberikan pagu sebesar Rp 421.280.000,00, realisasi sebesar Rp 203.024.700,00, adapun efisiensi anggaran atas capaian kinerja sebesar 47,03% dengan perhitungan sebagai berikut :

Capaian RO (CRO)	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO)-RARO	EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) x (1)	(5) = (4)- (3)	(6) = (5) / (2)
95.22%	421,280,000	203,024,700	401,142,816	198,118,116	47.03%

Faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran dibawah target adalah sebagai berikut :

Pada perubahan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Surat Edaran Gubernur Banten Nomor 56 Tahun 2025 tentang Penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2025, tanggal 10 Oktober 2025, Biro Organisasi mendapatkan penambahan anggara sebesar Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah). Adapun tambahan anggaran sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) diperuntukan bagi kegiatan Survey Provinsi Banten Face to Face Interview, yang pelaksanaannya menggunakan jasa konsultansi. Memperhatikan bahwa sampai dengan tanggal 10 Oktober 2025 masih proses input RKA SKPD, pelaksanaan proses pengadaan jasa konsultansi dan waktu pelaksanaan kegiatan survey yang waktu sfektifnya tinggal tersisa 35 hari kerja maka atas kegiatan dimaksud tidak dapat dilaksanakan mengingat waktu proses pengadaan jasa konsultansi dan kegiatan survey yang tidak memungkinkan pelaksanaannya di Tahun 2025.

- **Sasaran strategis keenam** : Meningkatnya Pelaporan Kinerja yang Informatif dengan indikator Nilai Komponen Pelaporan Kinerja penanggung jawab Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi. Anggaran yang mendukung untuk capaian sasaran strategis diatas diberikan pagu sebesar Rp 181.199.600,- terealisasi sebesar Rp 156.534.763,-, adapun efisiensi anggaran atas capaian kinerja sebesar 9,94% dengan perhitungan sebagai berikut :

Capaian RO (CRO)	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO)- RARO	EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) x (1)	(5) = (4)- (3)	(6) = (5) / (2)
96.33%	181,199,600	156,534,763	174,549,575	18,014,812	9.94%

Faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran dibawah target adalah sebagai berikut :

Penyerapan anggaran kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja belum mencapai target disebabkan oleh adanya efesiensi dari perjalanan dinas, serta Optimalisasi sumber daya internal sebagai narasumber/fasilitator yang dibayarkan hanya 50 %, serta adanya penyesuaian pelaksanaan kegiatan, perubahan metode pelaksanaan, serta keterbatasan kesiapan SDM dan unit kerja terkait.

- **Sasaran strategis ketujuh** : Meningkatnya Budaya Kerja ASN dengan indikator Indeks ASN Berakhlak (Nilai) penanggung jawab Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi. Anggaran yang mendukung untuk capaian sasaran strategis diatas dengan pagu sebesar Rp 122.248.440,- dengan realisasi sebesar Rp. 113.030.223,- adapun efisiensi anggaran atas capaian kinerja sebesar 7,27% dengan perhitungan sebagai berikut :

Capaian RO (CRO)	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO)- RARO	EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) x (1)	(5) = (4)- (3)	(6) = (5) / (2)
99.73%	122,248,440	113,030,223	121,918,369	8,888,146	7.27%

Faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran adalah sebagai berikut :

- Pembayaran honor nara sumber internal pada kegiatan Evaluasi pelaksanaan Budaya kerja dibayarkan 50 %,
 - Adanya silfa dari perjalanan dinas luar dan dalam daerah.
-
- **Sasaran strategis kedelapan** : Meningkatnya Pelayanan Sekretariat Daerah dengan indikator Indeks Pelayanan Sekretariat Daerah (Indeks) penanggung jawab Biro Umum. Anggaran yang mendukung untuk capaian sasaran strategis diatas dengan pagu sebesar Rp. 186.021.836.322,- terealisasi sebesar Rp 172.795.838.142,-, adapun efisiensi anggaran atas capaian kinerja sebesar 14,92% dengan perhitungan sebagai berikut :

Capaian RO (CRO)	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO)-RARO	EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) x (1)	(5) = (4)- (3)	(6) = (5) / (2)
107.81%	186,021,836,322	172,795,838,142	200,550,141,739	27,754,303,597	14.92%

- **Sasaran strategis kesembilan** : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan dengan indikator Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Dimanfaatkan (%) penanggung jawab Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan. Anggaran yang mendukung untuk capaian sasaran strategis diatas dengan pagu sebesar Rp. 457.500.000,- terealisasi sebesar Rp 426.257.809,- adapun efisiensi anggaran atas capaian kinerja sebesar 6,83% dengan perhitungan sebagai berikut :

Capaian RO (CRO)	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO)-RARO	EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) x (1)	(5) = (4)- (3)	(6) = (5) / (2)
100.00%	457,500,000	426,257,809	457,500,000	31,242,191	6.83%

faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran dibawah target adalah sebagai berikut :

1. Efesinsi pada belanja cetak dan penggandaan;
 2. Efisiensi pada belanja Honorarium Narasumber, Moderator, MC dan Panitia; dan
 3. Efisiensi pada Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.
- **Sasaran strategis kesepuluh** : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator Persentase Kebijakan Ekonomi yang Dimanfaatkan penanggung jawab Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan. Anggaran yang mendukung untuk capaian sasaran strategis diatas dengan pagu sebesar Rp. 650.016.000,00, terealisasi sebesar Rp. 525.763.953,00, adapun efisiensi anggaran atas capaian kinerja sebesar 19,12% dengan perhitungan sebagai berikut :

Capaian RO (CRO)	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO)-RARO	EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) x (1)	(5) = (4)- (3)	(6) = (5) / (2)
100.00%	650,016,000	525,763,953	650,016,000	124,252,047	19.12%

faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran dibawah target adalah sebagai berikut : Pada Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian pada Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro terdapat tolak ukur Fasilitas Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) tidak terealisasi sepenuhnya dikarenakan kurangnya koordinasi dari Tim KDEKS untuk melaksanakan kegiatan dimaksud di Provinsi Banten.

- **Sasaran strategis kesebelas** : Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Nilai) penanggung jawab Biro Pengadaan Barang/Jasa. Anggaran yang mendukung untuk capaian sasaran strategis diatas dengan pagu sebesar Rp. 1.348.891.100,- terealisasi sebesar Rp 1.247.290.513,- adapun efisiensi anggaran atas capaian kinerja sebesar 12,38% dengan perhitungan sebagai berikut :

Capaian RO (CRO)	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO)-RARO	EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) x (1)	(5) = (4)- (3)	(6) = (5) / (2)
104.85%	1,348,891,100	1,247,290,513	1,414,312,318	167,021,805	12.38%

- **Sasaran strategis kedubelas** : Meningkatnya Pelayanan Pimpinan dengan indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan (Indeks) penanggung jawab Biro Administrasi Pimpinan. Anggaran yang mendukung untuk capaian sasaran strategis diatas dengan pagu sebesar Rp. 5.369.298.000,- terealisasi sebesar Rp 5.036.634.578,- adapun efisiensi anggaran atas capaian kinerja sebesar 14,33% dengan perhitungan sebagai berikut :

Capaian RO (CRO)	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO)-RARO	EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) x (1)	(5) = (4)- (3)	(6) = (5) / (2)
108.13%	5,369,298,000	5,036,634,578	5,805,821,927	769,187,349	14.33%

3.1.7 Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung capaian kinerja

- **Sasaran strategis pertama** : Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Diimplementasikan dengan indikator Hubungan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi/Sister Province (Instansi) penanggung jawab Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Didukung oleh Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah
- **Sasaran strategis kedua** : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Dimanfaatkan, penanggung jawab Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah/Biro Kesejahteraan Rakyat, didukung oleh Program Kesejahteraan Rakyat dan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar.
- **Sasaran strategis ketiga** : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan indikator Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, penanggung jawab Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, didukung oleh Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah.
- **Sasaran strategis keempat** : Meningkatnya Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi dengan indikator Indeks Reformasi Hukum penanggung jawab Biro Hukum, didukung oleh Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, serta Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan, Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan dan Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk hukum dan naskah hukum Lainnya.
- **Sasaran strategis kelima** : Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Implementasi Standar Pelayanan Publik yang berkelanjutan dengan indikator Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik yang diamanatkan pada Biro Organisasi, didukung oleh Program Penataan Organisasi dan kegiatan Fasilitasi

Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja.

- **Sasaran strategis keenam** : Meningkatnya Pelaporan Kinerja yang Informatif dengan indikator Nilai Komponen Pelaporan Kinerja penanggung jawab Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, didukung oleh Program Penataan Organisasi dan kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas kinerja.
- **Sasaran strategis ketujuh** : Meningkatnya Budaya Kerja ASN dengan indikator Indeks ASN Berakhlak (Nilai) penanggung jawab Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, didukung oleh Program Penataan Organisasi dan Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja.
- **Sasaran strategis kedelapan** : Meningkatnya Pelayanan Sekretariat Daerah dengan indikator Indeks Pelayanan Sekretariat Daerah (Indeks) penanggung jawab Biro Umum. Capaian target Indeks Pelayanan Sekretariat Daerah didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah.
- **Sasaran strategis kesembilan** : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan dengan indikator Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Dimanfaatkan (%) penanggung jawab Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan. Capaian target Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Dimanfaatkan didukung oleh Program Kebijakan Administrasi Pembangunan pada Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan sub kegiatan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah.

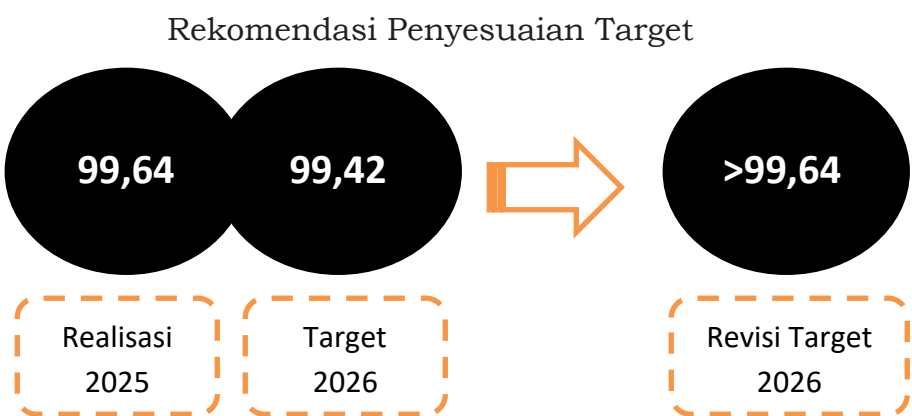
- **Sasaran strategis kesepuluh** : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator Persentase Kebijakan Ekonomi yang Dimanfaatkan penanggung jawab Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan. Capaian target Persentase Kebijakan Ekonomi yang Dimanfaatkan didukung oleh Program Perekonomian dan Pembangunan dan Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian, Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD.
- **Sasaran strategis kesebelas** : Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Nilai) penanggung jawab Biro Pengadaan Barang/Jasa. Capaian target Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa didukung oleh Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa serta kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- **Sasaran strategis keduabelas** : Meningkatnya Pelayanan Pimpinan dengan indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan (Indeks) penanggung jawab Biro Administrasi Pimpinan. Capaian target Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan didukung dua kegiatan yaitu Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan dan Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan.

Dari data hasil capaian kinerja diatas terdapat beberapa capaian kinerja tahun 2025 melebihi target indikator kinerja tahun 2026, oleh karena itu direkomendasikan penyesuaian target pada perubahan rencana kerja tahun 2026 terhadap indikator kinerja sebagaimana berikut :

- **Sasaran strategis kesatu** : Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Diimplementasikan dengan indikator Hubungan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi/Sister Province (Instansi) penanggung jawab Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.



- **Sasaran strategis keempat** : Meningkatnya Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi dengan indikator Indeks Reformasi Hukum penanggung jawab Biro Hukum.



- **Sasaran strategis kedelapan** : Meningkatnya Pelayanan Sekretariat Daerah dengan indikator Indeks Pelayanan Sekretariat Daerah penanggung jawab Biro Umum.



- **Sasaran strategis kesebelas** : Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa.

Rekomendasi Penyesuaian Target



- **Sasaran strategis kedua belas** : Meningkatnya Pelayanan Pimpinan dengan indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan penanggung jawab Biro Administrasi Pimpinan.

Rekomendasi Penyesuaian Target



Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja tiap indikator pada Tahun 2026 sebagai berikut:

- **Sasaran strategis pertama** : Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Diimplementasikan dengan indikator Hubungan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi/Sister Province (Instansi) penanggung jawab Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, sebagai berikut :
 1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan stakeholder lainnya untuk meningkatkan efektivitas kerjasama.
 2. Membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil,

sektor swasta, dan akademisi untuk meningkatkan kerjasama dan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah.

3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses kerjasama untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan stakeholder lainnya.
4. Meningkatkan kapasitas SDM pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola kerjasama.
5. Meningkatkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerjasama.
6. Membangun sistem monitoring dan evaluasi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja kerjasama.
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses kerjasama untuk meningkatkan kepemilikan dan kepercayaan masyarakat.
8. Meningkatkan kerjasama antar daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya.
9. Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan dukungan dan sumber daya.
10. Meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam mengelola kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

▪ **Sasaran strategis kedua** : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Dimanfaatkan, penanggung jawab Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, beberapa upaya untuk meningkatkan kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
2. Meningkatkan analisis kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat berdasarkan pada data dan informasi yang akurat dan relevan.
3. Meningkatkan koordinasi antar lembaga untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.
4. Meningkatkan evaluasi kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan dapat diperbaiki jika diperlukan.

5. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pembuatan kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.

- **Sasaran strategis ketiga** : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan indikator Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, penanggung jawab Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagai berikut :

Pelaksanaan Evaluasi terhadap LPPD Provinsi Banten Tahun 2024 Berdasarkan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten Tahun 2023 yang telah disampaikan melalui SILPPD kepada Pemerintah Pusat, telah dilakukan review khususnya terhadap data Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome yang termuat dalam LPPD, mengingat IKK dimaksud berfungsi sebagai variabel penilai yang mencerminkan keberhasilan kinerja atas penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan, sehingga setiap IKK wajib disertai dengan data atau dokumen pendukung yang objektif, valid dan akuntabel sehingga dapat menggambarkan capaian kinerja pemerintahan daerah yang sesungguhnya. Selain itu, data IKK yang diinput kedalam SILPPD juga harus melalui review oleh APIP di daerah untuk memastikan terhadap kualitas data atau dokumen pendukung IKK yang telah disajikan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

- **Sasaran strategis keempat** : Meningkatnya Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi dengan indikator Indeks Reformasi Hukum penanggung jawab Biro Hukum, sebagai berikut:
 1. Meningkatkan komitmen politik dari pemerintah dan legislatif untuk melakukan reformasi hukum.
 2. Membangun sistem manajemen yang efektif untuk mengelola proses reformasi hukum.
 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses reformasi hukum.
 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses reformasi hukum.
 5. Meningkatkan kapasitas SDM pemerintah dan legislatif untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola reformasi hukum.

6. Meningkatkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses reformasi hukum.
7. Membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan akademisi untuk meningkatkan dukungan dan sumber daya.
8. Meningkatkan pengawasan terhadap proses reformasi hukum untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
9. Meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam mengelola reformasi hukum untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.
10. Membangun sistem monitoring dan evaluasi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja reformasi hukum.

- **Sasaran strategis kelima** :Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Implementasi Standar Pelayanan Publik yang berkelanjutan dengan indikator Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik yang diamanatkan pada Biro Organisasi, sebagai berikut:

1. Melakukan Pembinaan, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik terhadap perangkat daerah yang dinilai
2. Peningkatan Transparansi Informasi Layanan melalui media publikasi baik elektronik maupun non elektronik
3. Pemenuhan Sarana Prasarana Pelayanan Inklusif

- **Sasaran strategis keenam** : Meningkatnya Pelaporan Kinerja yang Informatif dengan indikator Nilai Komponen Pelaporan Kinerja penanggung jawab Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, sebagai berikut:

Masalah

1. Ketidakkonsistenan Data dan Informasi Kinerja
2. Kualitas Analisis Pelaporan Masih Lemah
3. Bukti Dukung Pelaporan Tidak Lengkap
4. Kapasitas SDM Pelaporan Terbatas

Upaya Perbaikan

1. Melakukan Penataan dan Sinkronisasi Data Kinerja perangkat daerah
2. Melakukan Penguatan Kualitas Analisis Kinerja dst
3. Melakukan Penataan Bukti Dukung Pelaporan

4. Peningkatan Kapasitas dan Tata Kelola SDM

- **Sasaran strategis ketujuh** : Meningkatnya Budaya Kerja ASN dengan indikator Indeks ASN Berakhlak (Nilai) penanggung jawab Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, sebagai berikut:

Masalah

1. Pelayanan masih berfokus pada prosedur, belum pada kebutuhan pengguna.
2. Standar pelayanan belum dipahami seluruh ASN.
3. Pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti secara konsisten.
4. Pelaporan kinerja belum sepenuhnya berbasis data dan hasil.
5. ASN belum memahami keterkaitan kinerja individu dengan kinerja organisasi.
6. Dokumentasi eviden kinerja tidak tertata dengan baik.
7. Kesenjangan kompetensi ASN dengan tuntutan tugas dan perubahan kebijakan.
8. Pelatihan belum berbasis kebutuhan nyata (training need analysis).
9. Minimnya budaya belajar dan berbagi pengetahuan.
10. Komunikasi antar ASN dan unit kerja belum efektif.
11. Masih terdapat ego sektoral dan konflik internal.
12. Lingkungan kerja belum sepenuhnya inklusif.

Upaya perbaikan

1. Penguatan standar pelayanan dan maklumat layanan di seluruh unit.
2. Pelatihan *service excellence* bagi ASN frontliner dan back office.
3. Optimalisasi kanal pengaduan dan monitoring tindak lanjutnya.
4. Penyelarasan SKP individu dengan perjanjian kinerja unit/organisasi.
5. Peningkatan kapasitas ASN dalam pelaporan kinerja berbasis hasil.
6. Penataan arsip dan eviden kinerja secara digital dan

terstandar.

7. Penyusunan peta kompetensi jabatan dan ASN.
8. Pelaksanaan pelatihan berbasis kebutuhan dan hasil evaluasi kinerja.
9. Penguatan *knowledge sharing* dan *coaching* internal.
10. Penguatan komunikasi internal dan kerja tim lintas unit.
11. Penerapan nilai saling menghargai dan kerja kolaboratif.
12. Penciptaan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan inklusif.

- **Sasaran strategis kedelapan** : Meningkatnya Pelayanan Sekretariat Daerah dengan indikator Indeks Pelayanan Sekretariat Daerah (Indeks) penanggung jawab Biro Umum, sebagai berikut:

Masalah

1. Sarana dan Prasarana dalam mendukung Pelayanan
2. Kualitas SDM dalam pelayanan informasi publik

Upaya Perbaikan

1. Pengaturan Area Parkir tamu yang lebih teratur
2. Memberikan pelatihan khusus terkait *Services Excellent*

- **Sasaran strategis kesembilan** : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan dengan indikator Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Dimanfaatkan (%) penanggung jawab Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, sebagai berikut:

6. Meningkatkan komunikasi: Meningkatkan komunikasi yang efektif dengan tim dan atasan.
1. Meningkatkan efisiensi: Meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui penggunaan teknologi dan proses yang lebih baik.
2. Meningkatkan kualitas: Meningkatkan kualitas hasil kerja melalui pengawasan dan evaluasi yang ketat.
3. Meningkatkan inovasi: Meningkatkan inovasi dan kreativitas melalui eksperimen dan pengambilan risiko yang terkendali.

- **Sasaran strategis kesepuluh** : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator Persentase

Kebijakan Ekonomi yang Dimanfaatkan penanggung jawab Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, sebagai berikut:

Masalah

- Kurangnya koordinasi dari Tim Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Banten untuk melaksanakan kegiatan.

Upaya Perbaikan

1. Agar Tim Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan penganggaran pada Biro Ekbang.
2. Diharapkan KDEKS dapat mendapatkan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Banten agar seluruh pengelolaan serta tanggungjawab ada pada Tim KDEKS.

- **Sasaran strategis kesebelas** : Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Nilai) penanggung jawab Biro Pengadaan Barang/Jasa, sebagai berikut:

Masalah

1. Rencana Umum Pengadaan (RUP) belum tepat waktu
2. Kelembagaan dan SDM Pengadaan belum terpenuhi secara optimal
3. Pengendalian Pelaksanaan Kontrak belum optimal
4. Belum optimalnya Pemanfaatan Sistem Pengadaan Elektronik
5. Monitoring dan Evaluasi Pengadaan belum efektif

Upaya Perbaikan

1. Meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu penyusunan RUP
2. Melakukan pemenuhan dan penguatan kapasitas SDM pengadaan
3. Meningkatkan kualitas pengendalian kontrak melalui pemantauan pelaksanaan pekerjaan
4. memastikan seluruh tahapan pengadaan dilaksanakan secara elektronik dan data pengadaan terdokumentasi secara lengkap dan akurat
5. Memperkuat pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengadaan secara berkala berbasis data

- **Sasaran strategis keduabelas** : Meningkatnya Pelayanan Pimpinan dengan indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan (Indeks) penanggung jawab Biro Administrasi Pimpinan, sebagai berikut:

Masalah

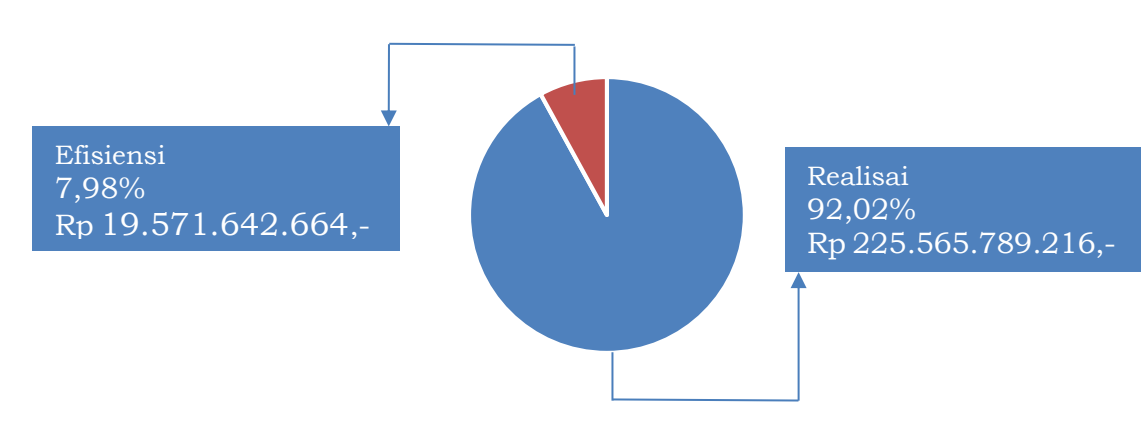
1. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan pimpinan belum sepenuhnya memadai, sehingga mempengaruhi kelancaran dan efektivitas pelayanan.
2. Koordinasi terkait penjadwalan kegiatan pimpinan belum berjalan optimal karena sebagian fungsi pelayanan pimpinan berada di Biro Umum.

Upaya Perbaikan

1. Mengusulkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) ke Biro Umum.
2. Mengusulkan penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Sekretariat Daerah.

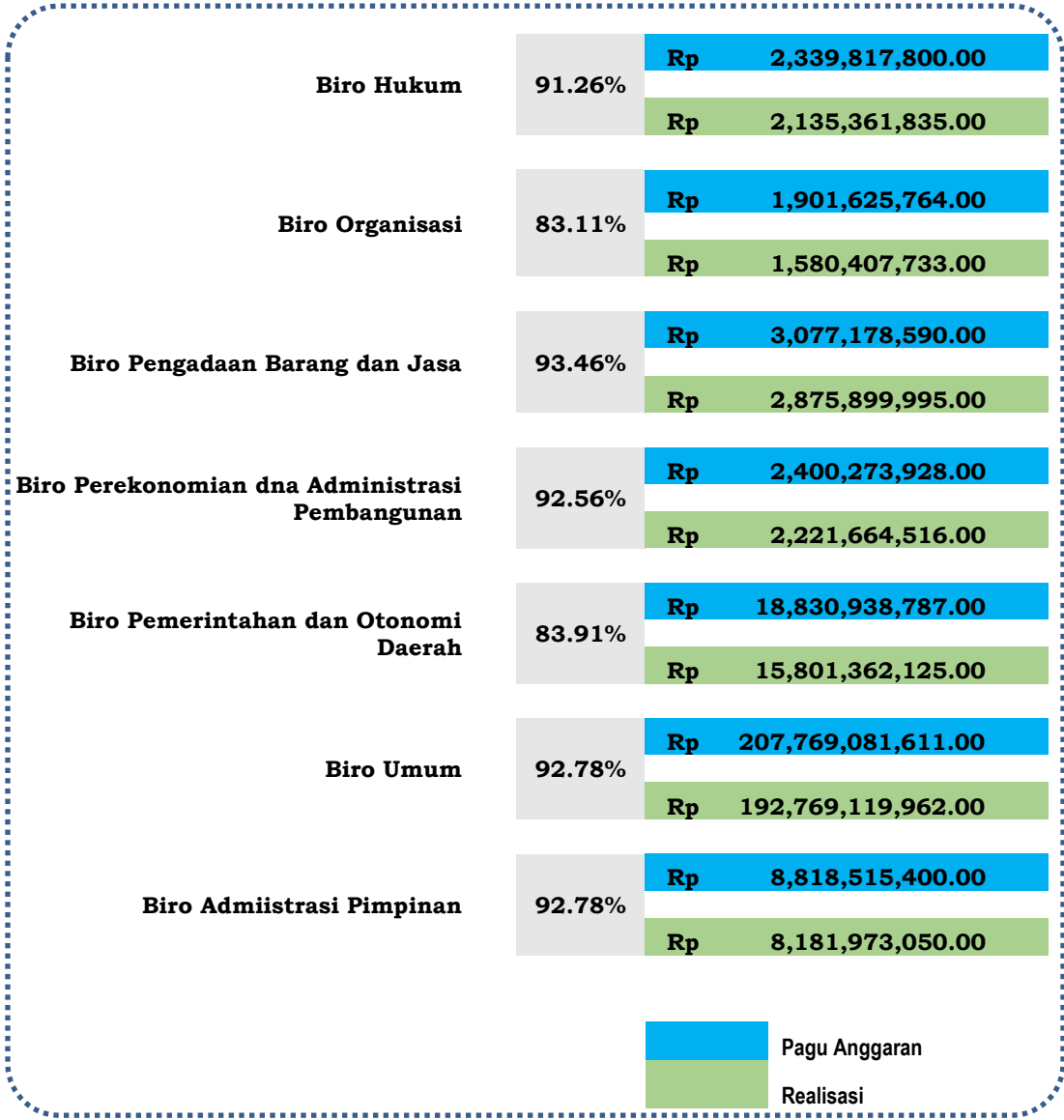
3.2 Realisasi Anggaran

Tahun 2025 Sekretariat Daerah Provinsi Banten memperoleh anggaran sebesar **Rp 245.137.431.880,-** dengan terealisasi sebesar **Rp 225.565.789.216,-** dengan demikian kinerja keuangan tercapai sebesar **92,02%**. dari kinerja tersebut diperoleh efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar **7,98%**. atau sebesar **Rp 19.571.642.664,-**. Hal tersebut dipengaruhi dengan adanya kebijakan pusat tentang efisiensi anggaran.



Secara rinci pagu anggaran, realisasi, dan capaian realisasi anggaran untuk setiap penanggungjawab dijabarkan pada gambar 3.1 dibawah:

Gambar 3.1
Realisasi Anggaran



BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 merupakan dokumen yang menggambarkan akuntabilitas pencapaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah selama tahun 2025. Di dalamnya, termuat kondisi yang telah dicapai, faktor-faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja, upaya yang telah dilakukan, serta efisiensi sumber daya anggaran yang dapat diperoleh. Selain itu, memuat pula rencana upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja di tahun 2026.

Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2025 difokuskan untuk mendukung pencapaian kinerja 12 (dua belas) Indikator Kinerja sebagai berikut Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan, Indeks Pelayanan Sekretariat Daerah, Indeks Reformasi Hukum, Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Dimanfaatkan, Persentase Kebijakan Ekonomi yang Dimanfaatkan, Hubungan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi/Sister Province, Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Dimanfaatkan, Nilai Komponen Pelaporan Kinerja, Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa.

Secara singkat dapat disampaikan bahwa indikator Hubungan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi/Sister Province (Instansi) yang tahun 2025 dengan target **7 kerjasama** dan realisasi **10 kerjasama** sehingga kinerja tercapai **142,86%**, hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Banten terus konsisten untuk meningkatkan kerjasama dengan daerah ataupun instansi guna mengdongkrak perekonomian daerah, indikator Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditargetkan mendapat nilai **100%**, dengan realisasi **100%** capaian **100%**, indikator Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah target kinerja tahun 2025 mendapat nilai **3,49**, sehubungan nilai tahun 2025 belum rilis, untuk nilai realisasi menggunakan nilai tahun 2024 yaitu

sebesar **3,45** atau capaian **98,85%**, Indeks Reformasi Hukum ditargetkan mendapat nilai **99,41**, adapun realisasi sebesar **99.64** dengan Kategori AA (Istimewa) atau capaian **100,23%**, capaian tersebut sudah melebihi target akhir jangka menengah, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Banten berkomitmen dalam meningkatkan kualitas regulasi, aksesibilitas, efisien, transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Banten, indikator Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik ditargetkan mendapat nilai **94,02**, dengan realisasi **89,53** capaian **95,22%**; indikator Nilai Komponen Pelaporan Kinerja tahun 2025 ditargetkan mendapat nilai **11,17**, sehubungan nilai tahun 2025 belum rilis, maka capaian indikator Nilai Komponen Pelaporan Kinerja realisasinya menggunakan nilai capaian tahun 2024 yaitu sebesar **10,76** atau **96,33%**, dilihat dari capaian tahun-tahun sebelum realisasi selalu menunjukkan peningkatan hal tersebut menunjukkan bahwa AKIP Banten ada perbaikan pada setiap tahunnya, indikator Indeks ASN Berakhlak yang diamanatkan kepada Biro Organisasi ditargetkan mendapat nilai **76**, tahun 2025 kementerian RB tidak melakukan penilaian indeks ASN BerAKHLAK sehingga capaian kinerja mengacu pada hasil realisasi tahun 2024 yaitu **75.8** atau **99,73%**; indikator Indeks Pelayanan Sekretariat Daerah yang diamanatkan kepada Biro Umum, ditargetkan mendapat nilai **3,20**, dengan realisasi **3,45** capaian **107,81%**, nilai tersebut didapat dari hasil survei mandiri, indikator Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Dimanfaatkan yang diamanatkan kepada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, ditargetkan mendapat nilai **100%**, dengan realisasi **100%** capaian **100%**, hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas kebijakan Administrasi Pembangunan yang dibuat tahun 2025 semuanya termanfaatkan, indikator Persentase Kebijakan Ekonomi yang Dimanfaatkan yang diamanatkan kepada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan ditargetkan mendapat nilai **100%**, dengan realisasi **100%** capaian **100%**, indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang diamanatkan kepada Biro Pengadaan Barang/Jasa ditargetkan mendapat nilai **89,30** dengan realisasi **93,63** capaian **104,85%**, hal tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengadaan barang dan jasa di Provinsi

Banten, Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan yang dimantakan kepada Biro Administrasi Pimpinan, ditargetkan mendapat nilai **3,20**, dengan realisasi **3,46** capaian **108,13%**.

Ketercapaian kinerja diperoleh melalui pelaksanaan 8 program yaitu Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, Program Kesejahteraan Rakyat, Program Perekonomian dan Pembangunan, Program Kebijakan Administrasi Pembangunan, Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, Program Penataan Organisasi, serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Dari pelaksanaan program-program tersebut Sekretariat Daerah memiliki efisiensi sebesar **7,98%** atau sebesar **Rp 19.571.642.664,-** dari pagu anggaran sebesar **Rp 245.137.431.880,-** terealisasi sebesar **Rp 225.565.789.216,-**.

Dengan kinerja yang telah dicapai di tahun 2025, Sekretariat Daerah Provinsi Banten berkomitmen untuk terus meningkatkan baik kinerja maupun akuntabilitas kinerja, dengan demikian dapat mewujudkan tata kelola yang berkualitas untuk mendorong pembangunan Banten yang lebih efektif dalam mensejahterakan masyarakat.

4.2 SARAN

Dalam upaya peningkatan kinerja untuk tahun selanjutnya, perlu kiranya dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pemetaan dan perumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan yang mengikuti perkembangan situasi Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui optimalisasi peran Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan dan Jabatan Fungsional lainnya di lingkup Sekretariat Daerah;
2. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan SKPD teknis dan stakeholders lainnya guna memastikan kebijakan yang disusun dapat terlaksana dengan optimal;
3. Meningkatkan pengendalian kebijakan yang dilaksanakan SKPD teknis dengan membuat laporan pengendalian kebijakan dalam pelaksanaan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah;

4. Melaksanakan Program dan Kegiatan yang mampu mendukung target kinerja dan dapat mengungkit kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah;
5. Biro penanggung jawab atas target indikator kinerjanya persentase agar berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait tentang bukti dukung atas keberhasilan/kegagalan capaian kinerja;
6. Untuk capaian indikator kinerja yang nilai capaiannya didapat dari penilaian mandiri (SKM) agar mengevaluasi kembali indikator pertanyaan dalam survei apakah sudah sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan;
7. Koordinasi yang intensif dengan perangkat daerah terkait perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi, terutama bagi penanggung jawab yang capaian indikator kinerjanya dinilai oleh pusat.

Dengandemikian perlu perhatian terhadap hal-hal tersebut di atas, dan diharapkan terjadi penguatan konsistensi upaya pencapaian rencana strategis dan peningkatan kualitas capaian hasil kinerja yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah khususnya, serta Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Banten pada umumnya.

Serang, 20 Februari 2026
Sekretaris Daerah

Deden Apriandhi

Lampiran-lampiran

1. Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah (Murni dan Perubahan)
2. Surat Pernyataan Telah Di Reviu
3. Dokumen lainnya yang diperlukan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123 Fax. 200520



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos., M.Si**

Jabatan : **Pj. SEKRETARIS DAERAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. DAMENTA**

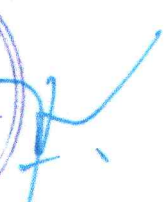
Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2025

Pihak Kedua,

A. DAMENTA

Pihak Pertama,


USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos., M.Si
NIP. 19700320 200112 1 001

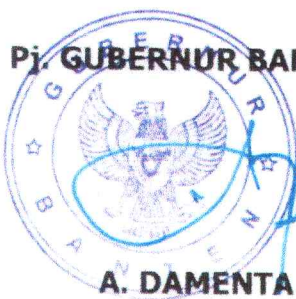
SATUAN KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

DPA TA-2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Sosial	Proporsi Penduduk Miskin yang mendapatkan Pelayanan Sosial	Persen	7,77
2	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	65,89
3	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita Tahunan yang disesuaikan	Ribu Rupiah	12.438
4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	63,09
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	2-3
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai	76,56

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	253.786.078.000
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	215.620.878.240
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	2.521.945.000
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.790.000.000
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	27.032.143.000
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	2.473.870.800
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.326.480.000
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	2.120.760.960
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	900.000.000
JUMLAH		253.786.078.000

Pj. GUBERNUR BANTEN,

A. DAMENTA

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

USMAN ASSHIDDIQI OOHARA, S.Sos., M.Si
NIP. 19700320 200112 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123 Fax. 200520



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. DEDEN APRIANDHI H, S.STP., M.Si.**

Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDRA SONI**

Jabatan : **GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 28 Oktober 2025

Pihak Kedua,



Pihak Pertama,



H. DEDEN APRIANDHI H, S.STP., M.Si.
NIP. 19750428 199412 1 001

SATUAN KERJA : SEKRETARIAT DAERAH**DPPA TA-2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Diimplementasikan	Hubungan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi/Sister Province	Instansi	7
2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Dimanfaatkan	Persen	100
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	3,49
4	Meningkatnya Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	99,41
5	Meningkatnya Kepatuhan Implementasi Standar Pelayanan Publik yang berkelanjutan	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	94,02
6	Meningkatnya Pelaporan Kinerja yang Informatif	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja	Nilai	11,1
7	Meningkatnya Budaya Kerja ASN	Indeks ASN Berakhlak	Nilai	76
8	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat Daerah yang Prima	Indeks Pelayanan Sekretariat Daerah	Indeks	3,20
9	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Dimanfaatkan	Persen	100
10	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Ekonomi yang Dimanfaatkan	Persen	100
11	Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	89,30
12	Meningkatnya Pelayanan Pimpinan	Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan	Indeks	3,20

BELANJA DAERAH

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	245.137.431.880	PAPBD
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	222.173.473.740	PAPBD
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.482.636.440	PAPBD
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	985.862.000	PAPBD
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	16.185.291.800	PAPBD
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1.853.760.800	PAPBD
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	650.016.000	PAPBD
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.348.891.100	PAPBD
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	457.500.000	PAPBD
	JUMLAH	245.137.431.880	

GUBERNUR BANTEN,



ANDRA SONI

SEKRETARIS DAERAH,



H. DEDEN APRIANDHI H, S.STP., M.Si.
NIP/ 19750428 199412 1 001



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN INSPEKTORAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima, Serang Banten Telepon (0254) 7039946, Faksimile (0254) 267041
Laman www.inspektorat.bantenprov.go.id, Pos-el inspektorat@bantenprov.go.id, Kode Pos 42171

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA (LKj) SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Provinsi Banten untuk Tahun 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan secara terbatas yang menunjukkan bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan yang mendasar dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Serang, 24 Februari 2026

Inspektur Daerah
Provinsi Banten



Dr. Dra. Hj. Sitti Ma'ani Nina, M.Si, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19681012 198803 2 003